



Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,
Riset dan Teknologi
Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Maluku

La Raman, Rusli Manorek, Mezak Wakim,
Stenli R Loupatty, Ronaldo A Rahajaan

KEPULAUAN SULA

DALAM PERSPEKTIF SEJARAH



La Raman, Rusli Manorek
Mezak Wakim, Stenli R Loupatty,
Ronaldo A Rahajaan.

KEPULAUAN SULA DALAM PERSPEKTIF SEJARAH



Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Maluku

Jln Ir. M. Putuhena Wailela Pokarumah Tiga Ambon

E-mail bpsnt amq@yahoo.com

**KEPULAUAN SULA DALAM
PERSPEKTIF SEJARAH**

Kepulauan Sula Dalam Perspektif Sejarah

copyringht© Balai Pelestarian
Nilai Budaya Provinsi Maluku

Penulis

La Raman, Rusli Manorek
Mezak Wakim, Stenli R Loupatty
Ronaldo A Rahajaan

Tata Letak dan Sampul

Mezak Wakim

Diterbitkan oleh

Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Maluku
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,
Riset Dan Teknologi
Jln Ir M.Putuheni Wailela Poka
Rumahtiga Ambon (0911 322717)

Percetakan Sentra Ambon

Jln. Sultan Babulah No 09
i-vi + 100 halaman
Cetakan I :2021

ISBN : 978 -623-92863-7-8

Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang.
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh
Isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

SAMBUTAN
KEPALA BALAI PELESTARIAN
NILAI BUDAYA MALUKU

Saya menyambut gembira atas diterbitkan buku dengan judul *“Kepulauan Sula Dalam Persepektif Sejarah”* buku ini memberikan kontribusi penting bagi masyarakat Maluku Utara dalam melihat peranan Kepulauan Sula sebagai bagian penting dari sejarah rempah yang bersimpulkan pada pengaruh sosial dan politik. Harus di pahami juga bahwa laporan spesifik mengenai Kepulauan Sula pada sebelum abad ke 16 masih sangat sulit untuk ditemukan. Harapannya tentu pada laporan-laporan yang berasal dari era VOC (1602-1799). Oleh karena itu walaupun buku ini masih jauh dari kebenaran mutlak. Namun keberadaan buku ini akan mampu melengkapi pustaka peradaban sejarah Maluku Utara yang berorientasi rempah dan jalurnya. Inti sari dari buku ini adalah menekankan pada orientasi pemanfaatan sejarah rempah sebagai narasi penting bagi ke-Indonesiaan. Buku ini menjawab kebutuhan kepustakaan tentang Kepulauan Sula dan sejarahnnya.

Sebagai Kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Maluku saya sangat mengapresiasi penulisan buku ini, sehingga patutlah saya menyampaikan terima kasih kepada Peneliti/penulis buku ini yang dengan komitmen moral yang tinggi dengan keterbatasan yang ada, namun dapat merampungkan hasil penulisan buku ini.

Demikian sambutan saya atas diterbitkannya buku ini, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu mencerahkan akal pikiran kita bersama dalam membangun masa depan bangsa ini secara lebih baik, lebih bermartabat dan disegani oleh bangsa-bangsa lain.

Ambon, Juli 2021
Kepala Balai

Drs. Rusli Manorek
NIP. 196409031991031001

PENGANTAR PENULIS

Kepulauan Sula dalam Perspektif Sejarah, demikian judul utama dari riset ini, secara spesifik terlihat mudah tetapi sesungguhnya kajiannya sangat kompleks karena merekonstruksi sejarah kepulauan Sula secara utuh dengan periodisasi yang lama membutuhkan ketelitian tersendiri karena konteks peristiwa antar periode sangatlah berbeda. Hambatan yang juga mengemuka adalah adanya keterbatasan sumber-sumber primer mengenai kepulauan Sula. Rata-rata sumber yang membahas kepulauan berasal dari abad ke 18 dan 19. Laporan spesifik mengenai Sula pada sebelum abad ke 16 masih sangat sulit untuk ditemukan. Harapannya tentu pada laporan-laporan yang berasal dari era VOC (1602-1799), tetapi perlu dipahami bahwa konsentrasi VOC dalam pelaporan sebagian besar menyangkut pusat-pusat kekuasaan utama seperti Ternate, Tidore, Makiyan, Ambon, Huamual, dan Banda. Laporan mengenai Sula disampaikan secara acak dalam pemberitaan mengenai wilayah kekuasaan Ternate.

Sekalipun sangatlah kompleks, tetapi optimisme yang tinggi dari tim peneliti sehingga problem riset sejarah terhadap Kepulauan Sula mampu terpecahkan. Asa, doa, dan semangat riset telah mendorong tim peneliti untuk bekerja maksimal menganalisa data terbatas terutama pada periode awal sejarah Sula sehingga rekonstruksi mampu diselesaikan. Kami memahami bahwa tidak ada kebenaran sejati yang dikemukakan pada laporan ini tetapi masih ada fakta-fakta sejarah yang tidak terjangkau karena keterbatasan sumber. Mengingat hal demikian, penelitian kiranya akan mendapatkan masukan, saran, input-input sebagai koreksi dari kalangan ilmuwan untuk menyempurnakan sehinggakan dapat dipublikasikan dan layak menjadi bahan

bacaan atau rujukan bagi penelitian-penelitian lebih lanjut terutama yang berkaitan dengan sejarah kepulauan Sula.

Penetapan riset mengenai kepulauan Sula merupakan upaya untuk mengangkat persoalan sejarah yang belum banyak dilakukan atau lolos dari perhatian sekalipun penuh konsekuensi. Untuk mencapai hasil maksimal dalam pemabahasan, kami melakukan pendekatan tematik dalam proses penulisan. Hal ini kami lakukan untuk menghindari persoalan sejarah yang bersifat menjebak. Selain itu penulisan sejarah dengan pendekatan tematik pada sejarah kepulauan Sula sedikit lebih mudah jika dibandingkan dengan menyusun narasi sejarah dengan pendekatan kronologis. Dan ini terbukti memberi hasil positif karena penelitian ini laporannya mampu kami selesaikan dan walaupun hasilnya tidak sempurna.

Kami menyadari bahwa riset ini tidak akan terlaksana tanpa dukungan dari berbagai kalangan. Untuk ijinikan kami untuk menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Bupati Kepulauan Sula, Kepala BPNB Maluku, Kepala Dinas Pariwisata, Perpustakaan Rumphius dan para informan yang telah telah mendukung tercapai penelitian terhadap sejarah Kepulauan Sula. Semoga laporan ini menjadi pijakan kuat untuk melakukan riset-riset lanjutan mengenai kepulauan Sula dalam berbagai perspektif keilmuan

DAFTAR ISI

Kata pengantar`i
Sambutan Kepala Balai`ii
Daftar isi`iii

BAB I PENGANTAR `1

A. Latarbelakang`1
B. Landasan Pemikiran`6
C. Kerangka Konseptual`8

BAB II SKETSA WILAYAH: PAPARAN GEOGRAFIS, DEMOGRAFIS, EKOLOGI, BAHASA, ELIGIUS DAN PEMERINTAHAN`12

A. Gambaran Geografis`13
B. Deskripsi Demografis dan Pemukiman`21
C. Lingkungan Ekologi dan Bahasa`31
D. Religius: <i>Animisme, Penyebaran Islam dan Misi Zending</i> `36

BAB III KEPULAUAN SULA SEBAGAI WILAYAH VASAL KESULTANAN TERNATE`49

A. Menjadi Wilayah Vasal`51
B. Geopolitik Sula Pada Era Kesultanan Ternate`54
C. Peran Wilayah Menurut Agenda Kesultanan`56
D. <i>Salabakan</i> dan <i>Sangaji</i> ; Struktur Kekuasaan Wilayah Vasal`57

BAB IV KEPULAUAN SULA PADA ERA VOC (1602-1799)`62

A. Kehadiran Belanda Di Maluku Utara`63

- B. Sula Di Bawah VOC : Antara Penyerahan Mandat dan Ekspansi`73
- C. Dinamika Sula Pada Fase Awal VOC`75
- D. Sula Pada Masa Praktik Monopoli`78
- E. Pelayaran dan Perdagangan Lokal : Ambon-Sula-Ternate dan Banngai`81
- F. *Vermachting*; Benteng dan Pangkalan Perdagangan VOC di Kepulauan Sula`85

BAB V KEPULAUAN SULA PADA ERA KEKUASAAN KOLONIAL`89

- A. Hubungan Dengan Pemerintah Kolonial Belanda`91
- B. Sistem Pemerintahan Menurut Mekanisme Kolonial`93
- C. Penarikan Pajak, Praktik Kerja Wajib dan Peradilan`98
- D. Kebijakan Kolonial di Bidang Pelayaran`101

BAB VII PENUTUP: AKHIR PENELUSURAN`104

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENGANTAR

A. Latar Belakang

Pada saat mencapai puncak kejayaan, lingkup pengaruh kesultanan Ternate terbentang hingga bagian selatan Mindanao, Kepulauan Sangir dan Talaud, Minahasa, Gorontalo, dan wilayah-wilayah lain di Teluk Tomini, Kepulauan Banggai, dan Sula, sebagian besar pesisir timur Sulawesi, Buton, Solor, Buru, bagian dari Kepulauan Seram, dan Ambon.¹ Untuk mengontrol setiap wilayah vassal, Sultan Ternate menempatkan seorang *Kimalaha* atau *Salahakan* yaitu pejabat setingkat kepala desa atau kepala wilayah (distrik).² Dengan kepemilikan wilayah vassal yang membentang luas, pada konteks politik membuktikan bahwa, kesultanan Ternate merupakan salah satu kesultanan di Maluku Utara yang sangat berpengaruh dan memiliki superioritas dalam ekspansi wilayah di kawasan timur Nusantara. Selama tiga abad lamanya kepulauan Sula dipertahankan statusnya menjadi wilayah vassal Ternate.³

Berdasarkan teks-teks laporan dari abad ke 15 dan 16, dijelaskan mengenai wilayah kekuasaan atau vassal yang secara realistis selalu mempertahankan fungsi strategisnya masing-masing. Terdapat wilayah vassal yang menjadi tempat transit

¹ *Encyclopaedia van Nederlandsch Indie IV*, hlm. 321

² Leonard Y. Andaya, *The World of Maluku : Eastern Indonesia in the Early Modern Period*, (Honolulu USA: University of Hawaii Press, 1993), hlm. 282.

³ M. Dassen H.J.Zoon, *De Nederlanders in de Molukken*, (Utrecht: W.H. Van Heijningen, 1848), hlm. 109.

pelayaran, lumbung pangan, upeti atau sumber perikanan bagi kesultanan Ternate. Diantara keseluruhan wilayah vassal yang memiliki kesan strategis dan punya sumbangsih terhadap dinamika kekuasaan kesultanan Ternate yang tidak dapat dikesampingkan adalah Kepulauan Sula yang terletak di semenanjung timur Celebes. Sula atau Xula merupakan gugusan kepulauan yang terdiri dari tiga pulau utama masing-masing; *Sula Sanana, Sula Mangoli dan Taliaboe*,⁴ (Valentyn menyebut ketiga pulau ini dengan Xula Talyabo, Xula Mangoli, dan Xula Besi).⁵ Letaknya berada antara 124°10' dan 126°30' BT dan 1°40' dan 2°20' LS.⁶ Berdasarkan peta, memiliki panjang dari barat ke timur sekitar 250 km dan lebar dari utara ke selatan sekitar 90 km. Penduduk dibedakan dalam dua kelompok utama yaitu Orang Sula dan Orang Alfur.⁷ Penduduk Sula Sanana menempati pantai selatan Mangoli dengan pusat pemukiman di sebelah Timur Buruako. Di masa lalu pulau-pulau kecil hanya digunakan oleh penduduk sebagai pemukiman sementara. Pulau Sehu ditempati oleh orang Alfur, sedangkan di pantai berkarang di pulau Pasi Kena dan Samoda Kecil sejak lama telah hadir pemukiman orang "Bajo".⁸

⁴ P. Van Hulstijn, *Encyclopaedisch Bureau, Aflevering XV, Soela-Eilanden*, (Weltevreden: N.V. Boekhandel Visser & co. 1918), hlm. 3-4.

⁵ F. Valentyn, *Uitvoerige beschryving der vyf Moluccos* (Dordrecht: Joannes van Braam Boekverkoopen, 1724), hlm. 4.

⁶ F.S.A. De Clercq, *Bijdragen tot de Kennis der Residentie Ternate*, (Leiden; E.J. Brill, 1890), hlm. 114.

⁷ P. Van Hulstijn, (1918), *op.cit.*

⁸ *Ibid.*

Menurut “Valentyn, di antara ketiga pulau, Sula Besi (Sanana) yang banyak penduduknya”.⁹ Sementara Taliabu sangat kaya akan pohon sagu dan memiliki air yang sangat jernih. Sula Mangoli yang sering juga disebut Xula Sapelule kaya akan sagu.¹⁰ Selama periode kejayaan kesultanan Ternate, kepulauan Sula menjadi lumbung beras dan sagu¹¹ serta menjadi salah satu tempat penyedia budak atau kawula bagi sultan dan kaum bangsawan. Eksploitasi wilayah dan penduduk Sula biasanya dilakukan oleh para *Salahakan*. Di bawah Sultan Zainul Abidin, kekuasaan tumbuh menjadi dinasti Tomaitu, yang sejak tahun 1488 bermukim di Sula, dan menjalankan pemerintahan atas nama Sultan Ternate.¹²

Sejak akhir abad ke-15, ketika orang-orang Eropa (Portugis dan Spanyol) mengunjungi Maluku Utara, kepulauan Sula menjadi tempat persinggahan kapal-kapal Galleon Portugis dan Spanyol. Portugis menempatkannya sebagai daerah transit dalam pelayaran dari Maluku ke Ambon dan Papua. Sejak awal membuka rute pelayaran ke Maluku, Juan Sebastian d’Elcano menyinggahi Sula dengan kapal Victoria dan ini terjadi dalam pelayarannya kembali ke Spanyol dari Tidore pada 21 Desember 1521. Kunjungannya ke Sula terjadi melalui pelayaran rute Maluku barat laut¹³ dan dapat dipastikan, kapal-kapal Spanyol selama

⁹ F. Valentyn, (1724), *op.cit.* hlm. 88.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ M. Dassen H.J.Zoon, (1848), *op.cit.*

¹² F. Valentyn, (1724), *op.cit.*

¹³ P.A. Tiele, *De Europeers in den Maleischen Archipel, Eerste Gedeelte*, 1509-1529, (BKI, vol. XXIV, tahun 1876), hlm. 379.

masa-masa perebutan pengaruh terhadap kepulauan rempah melawan Portugis dan Belanda telah menempatkan Sula dalam posisi transit pelayaran.

Pada periode VOC (1602-1799), Sula kembali ditempatkan menjadi lumbung pangan bagi VOC sekaligus menjadi transit perdagangan rempah, dan budak. Akan tetapi dalam era VOC, sebagian bangsawan Ternate yang tidak senang dengan kekuasaan VOC, menjadikan Sula tempat pelarian dan menggalang kekuatan untuk melancarkan pemberontakan seperti pernah di lakukan oleh Majira dan juga Saidi pada tahun 1652 dan 1653, dan pada tahun-tahun berikutnya, juga Pangeran Kalamata tinggal di sana pada tahun 1655 dan bagaimana Sula pada akhir tahun 1656 jatuh di bawah kekuasaan Sultan Mandar Syah (1648-1672).¹⁴

Melihat letaknya yang strategis terutama sebagai transit atau penghubung dalam pelayaran maritim untuk wilayah Sulawesi, Maluku, Maluku Utara dan Papua, penduduk Sula pada akhirnya *bertransformasi* menjadi pelaut yang kemudian terlibat dalam pelayaran antar pulau dikawasan Maluku dan Maluku Utara. Mereka telah melakukan pelayaran ke Ternate, Obi, Buru, Seram, dan Ambon. Tersebar nya pusat-pusat pemukiman orang-orang Sula di Buru dan Seram serta adanya orang-orang Sula di Ternate bukanlah suatu kebetulan, tetapi aktifitas kemaritiman yang telah menyebabkan munculnya pemukiman dimaksud. Walaupun bukti keterlibatan mereka dalam pelayaran jarak jauh

¹⁴ F. Valentyn, (1724), *loc.cit.*

masih bersifat imajiner tetapi pelayaran antar pulau dikawasan Maluku dan Maluku Utara masih dapat ditelusuri dengan jelas.

Dalam pelayaran lokal, kepulauan Sula secara intensif mendapat kunjungan dari orang-orang Ambon pada 1693. Selanjutnya pada tahun 1690, ditengah ketatnya VOC melakukan monopoli, pelaut-pelaut Buru dan Amblauw melakukan pelayaran ke Sula. Apabila mencermati aktifitas pelayaran dalam era VOC yang menghubungkan Sula dengan pulau-pulau lainnya, seluruhnya berlangsung dibawah pengawasan pejabat-pejabat VOC di Ambon. Ritme pelayaran kapal-kapal lokal ke Sula berlangsung menurut regulasi pejabat VOC. Intensitas pelayaran lokal yang cukup ramai terjadi karena memang Sula menjadi lumbung sagu untuk kebutuhan penduduk. Selain itu letaknya ditengah pelayaran dari Ambon ke Ternate dan Obi, memudahkan kapal melakukan transit untuk mengangkut komoditas dagang atau mengambil perbekalan untuk pelayaran lanjutan.

Sebagai tempat transit pelayaran, sejak era kejayaan kesultanan, hingga VOC, Sula secara signifikan mendapat pengawasan. Apabila kesultanan menempatkan *Salabakan* untuk mengontrol Sula dan penduduknya, penguasa VOC lebih ketat lagi dalam melakukan kontrol dan pengawasan terhadap kepulauan ini. Wujud pengawasan ketat VOC diperlihatkan melalui pembangunan benteng yang menjadi arsenal untuk mengawasi jalannya pelayaran dan perdagangan antar pulau. Selain mengawasi lalulintas pelayaran kapal-kapal, upaya untuk

menghentikan aksi-aksi perompakan menjadi alasan lainnya dari pejabat VOC untuk menempatkan benteng di Sula.

Dengan merujuk pada aspek letak strategi kepulauan Sula yang selama beberapa periode lamanya telah memainkan andil dalam pelayaran di Maluku dan Maluku Utara tentu menjadi penting dilakukan suatu riset mendalam untuk aspek-aspek historis dari peran sebuah kepulauan menopang terjadinya pelayaran dan perdagangan antar pulau. Selain itu nuansa politik dalam perebutan pengaruh yang kemudian menempatkan wilayah sula berada dalam status daerah vassal kesultanan Ternate yang memiliki memorie kolektif tersendiri bagi penduduk Sula yang tentu menjadi aspek penting untuk di ungkap. Akhirnya riset ini dalam disainnya kami tempatkan dibawah judul “Sula di Semenanjung Timur Celebes; *Wilayah Vasal Ternate dan Jaringan Perdagangan Rempah (1500-1900)*”. Dengan topik riset yang demikian menurut hemat kami akan mampu mengungkap tidak hanya aspek jaringan pelayaran dan perdagangan itu sendiri tetapi mampu menelaah pula aspek-aspek sejarah politik dari penguasa pribumi kepulauan Sula dan penduduknya dalam hubungan kausalitas dengan penguasa Ternate dan orang-orang Eropa.

B. Landasan Pemikiran

Berdasarkan teks-teks lama, Kepulauan Sula merupakan jalur lalu lintas antara pulau Ternate dan Sulawesi atau Celebes. Di masa lalu kepulauan ini sering menjadi tempat kediaman sultan Ternate dan para bangsawannya. Melihat kondisi geografisnya, Sula terkesan sebagai daerah terisolasi oleh karena sarana perhubungan ke Ternate dan ke Celebes yang hubungannya

sepanjang waktu tidak bersifat bersahabat. Sejak era kejayaan kesultanan hingga era VOC, Sula telah muncul menjadi Garis penghubung untuk pelayaran maritim antara Kepulauan Maluku dan Celebes. Letak geografis dari kepulauan Sula sangat mempengaruhi perannya dalam sejarah pelayaran dan perdagangan kawasan Maluku dan Maluku Utara. Laporan-laporan lama mengenai selalu menjelaskan posisi kepulauan Sula tidak hanya sebagai rantai perhubungan pelayaran lokal tetapi juga sebagai lumbung pangan karena menghasilkan banyak sagu yang menjadi makanan pokok penduduk Maluku dan Maluku Utara sejak berabad-abad lamanya. Kondisi geopolitiknya dalam sejarah sangat ditentukan oleh dinamika perkembangan kesultanan Ternate dan munculnya praktik monopoli perdagangan rempah yang dilakukan oleh VOC di Maluku.

Perlu kami tegaskan bahwa kajian mengenai sejarah kepulauan Sula dalam kaitan dengan statusnya sebagai wilayah vassal Ternate dan juga sebagai jaringan pelayaran dan perdagangan maritim masa lalu di Maluku dan Maluku Utara telah dilakukan oleh beberapa penulis. Tetapi kajian yang lebih spesifik dan mendalam masih kurang memadai. Tulisan mengenai Sula yang disampaikan dimasa lalu terutama oleh penulis-penulis barat kurang meyakinkan dalam menjelaskan persoalan kepulauan Sula yang menjadi wilayah vassal Ternate dan letak startegisnya dalam pelayaran dan perdagangan maritim. Demikian halnya penulisan yang lahir pada perspektif kekinian sangat jauh dari diharapkan. Untuk itu dibutuhkan kajian terbaru yang lebih mendalam dalam memecahkan masalah kepulauan Sula dan perannya dalam sejarah.

C. Kerangka Konseptual

Secara konseptual, Vasal merupakan daerah taklukan¹⁵ dari suatu negara atau kerajaan. Dalam hirarki politik dan kekuasaan, dapat diartikan sebagai seseorang yang menjalin hubungan dengan monarki yang berkuasa dan biasanya dalam bentuk dukungan militer, perlindungan bersama (mutual protection), atau pemberian upeti, dan menerima jaminan dan imbalan tertentu sebagai gantinya.¹⁶

Menurut Ensiklopedia Indonesia, geopolitik (Geografi Politik) adalah kondisi politik yang dijalankan oleh suatu bangsa bertalian erat dengan sifat-sifat geografis daerah. Sifat-sifat geografis itu terutama menentukan politik luar negeri dan peperangan yang dijalankan.¹⁷ Secara luas geopolitik merujuk pada hubungan antara politik dan teritori dalam skala lokal atau internasional. geopolitik mencakup pula praktik analisis, prasyarat, perkiraan, dan pemakaian kekuatan politik terhadap suatu wilayah. Secara tradisional geopolitik menunjukkan hubungan antara kekuatan politik dan ruang geografis. Secara akademik, geopolitik mencakup analisis geografi, sejarah, dan ilmu sosial dengan mengacu pada politik ruang dan pola-polanya dalam berbagai skala.

Secara konseptual geopoliti Menurut Efimenco terdiri dari deskripsi dan analisis daerah yang terorganisir secara politik.

¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia

¹⁶ F. L. Ganshof, *Benefice and Vassalage in the Age of Charlemagne*, (Cambridge: *Historical Journal*, 1939), hlm. 147-175.

¹⁷ *Ensiklopedia Indonesia* jilid 2 Edisi Khusus, (Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoeve, 1991), hlm. 1116.

Menurut Weigert geopolitik terkait aspek tertentu dari hubungan bumi-manusia dengan perhatian khusus. Ini bukanlah hubungan antara lingkungan fisik dan kelompok manusia atau masyarakat, tetapi hubungan antara faktor-faktor geografis dan entitas (kesatuan) politik. Jones *et al.* mendefinisikan geopolitik sebagai sebuah gugus kerja (*cluster of work*) di dalam ilmu-ilmu sosial yang terlibat dengan beberapa pertemuan "politik" dan "geografi", di mana dua istilah ini dibayangkan sebagai konfigurasi segitiga. Pada satu sisi adalah segitiga kekuasaan, politik, dan kebijakan. Kekuasaan merupakan hal utama penopang dua yang lain. Politik adalah seluruh rangkaian proses yang terlibat dalam mencapai, menjalankan, dan me-nentang kekuasaan atas fungsi negara dalam pemilu, perang, ataupun sekedar gosip kantor. Kebijakan adalah hasil yang diharapkan, hal-hal di mana kekuasaan memungkinkan se-seorang untuk mencapainya, dan bahwa politik itu tentang berada pada posisi yang dapat menyelesaikannya.¹⁸

Perkembangan pelayaran di Indonesia (Nusantara) seperti dijelaskan dalam *Historical Dictionary of Indonesia* atau *Kamus Sejarah Indonesia* mulai berlangsung sejak masa lalu hingga abad ke-17, telah ada industri pelayaran pribumi besar di Indonesia. Kapal-kapal berukuran hingga 500 metrik ton dibuat dari kayu jati dan melayari rute-rute perdagangan di wilayah Indonesia.¹⁹

Perdagangan menurut *Historical Dictionary of Indonesia*

¹⁸ Juniawan Priyono dan Purnomo Yusgiantoro, *Geopolitik, Geostrategi, Geoekonomi*, (Bogor: Unhan Press, 2017), hlm. 5-7.

¹⁹ Robert Crib and Audrey Kahin, *Historical Dictionary of Indonesia*, (Toronto: Scarecrow Press, 2004), hlm. 372.

pengertiannya adalah; pertukaran barang antar-individu dan kelompok.²⁰ Sedangkan menurut Pierson seperti dikutip oleh Van Leur, perdagangan merupakan wujud disposisi barang yang dilakukan oleh anggota masyarakat.²¹ Selanjutnya Van Leur menjelaskan bahwa sifat dan ciri perdagangan pada periode awal sifatnya berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya, ciri yang serupa dengan ciri pada perdagangan dunia (zaman modern). Perdagangan jarak jauh mengangkut senjata-senjata yang berharga, peralatan dan perkakas, bahan-bahan untuk membuat peralatan, perhiasan, dan bermacam-macam tanaman asing serta ternak di sepanjang jalur darat dan jalur laut di sepanjang pesisir dari Samudera Atlantik sampai Samudera Hindia.²² Terdapat dua faktor yang menentukan dalam perdagangan, yaitu pemilik uang yang kaya raya dan pedagang keliling.²³

Perdagangan di Indonesia dengan tempat lainnya di dunia memiliki historisitas yang sama tuanya.²⁴ Akan tetapi terjadinya peningkatan teknologi pelayaran pada sekitar awal Masehi, Indonesia atau Nusantara di masa lalu baru memiliki peran penting dalam perdagangan karena telah menjadi bagian dari rute perdagangan maritim yang sangat besar yang membentang dari Cina selatan Mediterania timur. Faktanya; rute ini merupakan rangkaian rute perdagangan yang kompleks

²⁰ *Ibid.* hlm. 434.

²¹ J.C. Van Leur, *Perdagangann dan Masyarakat Indonesia, Esai-esai Tentang Sejarah Sosial dan Ekonomi Asia*, (terj. Abmi Handayani dkk.), (Yogyakarta: Komunitas Bambu, 2015), hlm. 43.

²² *Ibid.* hlm. 69-70.

²³ *Ibid.* hlm. 81.

²⁴ Robert Crib and Audrey Kahin, (2004), *op.cit.*

dimana mayoritas komoditas hanya menjalani sebagian dari total jaraknya dan biasanya berulang kali beralih tangan dari satu pedagang ke pedagang lainnya di pelabuhan perdagangan utama yang banyak terdapat di pesisir. Hingga abad ke-10, perdagangan di perairan Indonesia terutama berada di tangan orang Indonesia, sementara orang Asia Tenggara mengendalikan mayoritas pelayaran ke utara Cina. Sebaliknya, pedagang India mendominasi perdagangan di Teluk Benggala. Ritme perdagangan ini sesuai musim, mengikuti pola angin muson yang terus berubah.²⁵

Dalam kaitannya dengan jalur perdagangan dan posisi letak Indonesia, Van Leur menyampaikan penjelasannya; melalui perdagangan, Indonesia terhubung dengan pelabuhan-pelabuhan India dan menjadi kawasan perdagangan bagi Cina. Perdagangan yang menghubungkan pesisir-pesisir Indonesia dengan wilayah barat, dan kemudian dengan wilayah utara terlihat layaknya sebuah jaringan, sebuah ikatan emas. Barang-barang yang dibawa dan diangkut, bersamaan dengan para pedagang dan kapal, bertemu dalam jalur perdagangan yaitu perkampungan-perkampungan (dagang) di Indonesia yang dikuasai oleh pemerintah Indonesia yang di sana pedagang keliling berdesak-desakan di sekitar kawasan dagang utama.²⁶

²⁵ *Ibid.* hlm. 435.

²⁶ J.C. Van Leur, (2015), *op.cit.* hlm. 130.

BAB II

SKETSA WILAYAH: PAPARAN GEOGRAFIS, DEMOGRAFIS, EKOLOGI, BAHASA, RELIGIUS DAN PEMERINTAHAN

Kepulauan Sula yang berada di tengah lintasan pelayaran Maluku, Maluku Utara dan Sulawesi merupakan wilayah kepulauan dengan tiga pulau utama yakni Sulabesi (Soela Sanana), Mangoli (Soela Mangoli), dan Taliabu (Soela Taliaboe). Pada konteks historis, kepulauan Sula di masa lalu merupakan wilayah vassal kesultanan Ternate. Penaklukan kepulauan Sula oleh Ternate diperkirakan terjadi pada tahun 1570.²⁷

Merujuk pada kondisi geografisnya, kepulauan Sula sangatlah subur dan karena kondisi kesuburannya, wilayah ini menjadi lumbung pangan selama berabad-abad. Pada saat menjadi kontrol Ternate, Sula menjadi penopang pangan bagi kesultanan Ternate dan kemudian oleh penguasa VOC dan selanjutnya pemerintah kolonial, Sula menjadi lumbung pangan penting untuk menopang daerah-daerah diseputaran Maluku.

Penduduk kepulauan Sula, sejauh yang dapat di pahami dan dasarkan atas laporan era kolonial, terdiri dari orang Sula yang dianggap sebagai kelompok khusus dan orang Alfur. Antara kedua kelompok ini terdapat segi-segi persamaan tetapi juga banyak perbedaan. Mereka membentuk pemukiman disepanjang pantai dan kondisi pemukiman ini masih nampak jelas tergambar

²⁷ P. van Hulstijn, *Het Soela Eilanden*, dalam *Tijdschrift van Economische Geographie*, tahun 1919, hlm. 358.

hingga era kekinian. Orang Sula sendiri telah menempati kepulauan Sula selama berabad-abad lamanya. Penduduk Sula yang dianggap sebagai orang Sula dan juga kelompok suku-suku Alfur dalam perjalanan sejarahnya sering menjadi sasaran perompakan dari orang-orang Papua. Perbudakan terhadap mereka juga intensif terjadi dan ini dilakukan oleh penguasa Ternate. Orang-orang Sula secara rutin melakukan aktifitas pertanian dan perkebunan primitif dan ini hampir selalu ditekuni untuk memenuhi kebutuhan pokok.²⁸

Sebagai wilayah vassal Ternate, Sula dalam perspektif pemerintahan tertata menurut sistem kekuasaan kesultanan. Untuk menjalankan kekuasaan, Sultan menempatkan seorang Salahakan atau Sangaji. Sistem pemerintahan ini terus bertahan hingga hadirnya orang-orang Belanda di sula. Kehadiran Belanda dan selanjutnya menjalankan kekuasaan di Sula dapat terjadi melalui kontrak-kontrak dengan penguasa Ternate. Kehadiran Belanda di Sula terjadi sejak era VOC dan juga pemerintahan kolonial.

Mengenai situasi kepulauan Sula dalam perspektif geografis, ekologi, demografis serta pemerintahan secara lengkap akan kami jelaskan dalam sub bab berikut ini;

A. Gambaran Geografis

Merujuk pada laporan De Clercq yang bersifat argumentatif, kepulauan Sula yang terdiri atas tiga pulau besar dan beberapa pulau kecil terletak antara 124°10' dan 126°30' BT dan

²⁸ *Ibid.*

1°40' dan 2°20' LS.²⁹ Selain Clercq, laporan lainnya mengenai letak kepulauan Sula juga dikemukakan oleh penulis Belanda lainnya yakni C. Van der Hart. Dalam laporannya dikemukakan bahwa kepulauan Sula yang terdiri atas empat pulau masing-masing Sulabesi, Sula Mangoli, Lisa Matula dan Sula Taliabo, terbentang dari 1°55' sampai 2 ½° Lintang Selatan dan dari 123°6' sampai 126°15' Bujur Timur³⁰. Dengan menyandarkan diri pada peta laut, P. Van Hulstijn mengargumentasikan letak kepulauan Sula berada diantara 124°10' dan 126° 30' BT dan di antara 1° 40' dan 2° 20' LS.³¹ Menurut laporan yang lebih bersifat kekinian, koordinat kepulauan Sulat berada pada titik 1.8492°S-125.3144°E. Letaknya di antara, semananjung bagian timur Celebes/Sulawesi dan berdekatan dengan kepulauan Banggai dan kelompok pulau-pulau Obi serta Batjan.³²

Apabila mencermati dengan seksama laporan-laporan mengenai kepulauan Sula dari era kolonial dan kekinian, terlihat jelas argumentasi yang variatif mengenai letak dan luas kepulauan Sula. Akan tetapi dengan mencermati beberapa laporan era kolonial maka rujukan utama yang digunakan adalah laporan dari Hulstijn yang lebih mendekati tingkat kecermatan yang baik selain laporan kekinian yang lebih modern. Menurut Hulstijn, kepulauan

²⁹ F.S.A, De Clercq, *Bijdragen tot DeKennis der Residentie Ternate*, (Leiden: E.J. Brill, 1800), hlm.113-114.

³⁰ C. Van der Hart, *Reize Rondom het Eiland Celebes en naar Eenige der Moluksche Eilanden* ('s Gravenhage: K. Fuhri, 1853), hlm. 118.

³¹ P. Van Hulstijn, *Memorie over de Soela-Eilanden* dalam *Encyclopedisch Bureau, Aflevering XV*, (Weltevreden: N.V. Boekhandel Visser & Co. – 1918), hlm. 2.

³² *Ibid.* hlm. 1.

Sula, berdasarkan peta, memiliki luas secara keseluruhan sekitar 4838,51 km². Adapun secara terpisah untuk tiap-tiap pulau masing-masing; Sanana memiliki sekitar 523,87 km², Sula Mangoli dan sekitarnya, 1299,06 km² dan Taliaboe dan sekitarnya memiliki luas 3015, 58 km². Untuk pulau-pulau kecil sekitarnya memiliki luas 100,52 km².³³ Menurut laporan kekinian, luas secara keseluruhan kepulauan Sula minus Taliabu adalah sebesar 3.295,40 km².³⁴ Khusus untuk Pulau Taliabu yang kini telah memekarkan diri menjadi daerah kabupaten terpisah dari Sula memiliki luas wilayah secara keseluruhan sebesar 1.469,00 km².³⁵

Kepulauan Sula sangat bergunung; datarannya tidak begitu penting. Batas utama membentuk panjang pulau ini, suatu rangkaian pegunungan yang membentang dari barat ke timur lewat pulau-pulau tersebut, sementara rangkaian pegunungan melalui pulau Sula Sanana di sini berbentuk segi empat dan membentang dari utara ke selatan. Dari rangkaian utama ini, pegunungan kecil menurun atau lebih terjal ke pantai dan sangat rapat. Di banyak tempat, batuan karang ini membentang hingga kelaut.

Tanah pulau ini pada dasarnya subur terutama di beberapa tempat dataran rendah yang tidak berawa. Juga lereng perbukitan yang berfungsi sebagai ladang memiliki tanah yang baik bagi tanaman. Sula Sanana merupakan sebuah pulau bergunung, ketinggiannya mencapai 700 meter persegi. Dari

³³ *Ibid.* hlm. 2.

³⁴ Merujuk pada laporan pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula tahun 2020.

³⁵ Kutipan dari Laporan pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu tahun 2020.

sambungan gunung ini di utara (415 meter) rangkaian ini membentang sampai pantai di mana dataran di beberapa tempat hanya memiliki lebar beberapa ratus meter. Di utara bentangan pantai juga berawa dan di sana kadang-kadang ditemukan lereng terjal dari puncak bukit dekat hutan bakau.³⁶

Sula mangoli di sebelah timur membentuk rangkaian pegunungan yang sebagian membentuk gundukkan sampai ketinggian 1060 meter. Punggung gunung yang membentang melalui perpanjangan pulau itu paling tinggi ditemukan di timur (700 dan 800 meter) dan membentang ke barat melalui tanah perbukitan rendah. Di bagian pulau utama Sula Mangoli orang menemukan bentangan dataran pantai aluvial yang penting tetapi selain itu di pantai selatan lebih terjal, dengan suatu dataran berawa sempit. Pantai utara memiliki dataran rendah terbentang tetapi yang juga tidak lebih dari beberapa kilometer menjorok ke tanah ini dan yang sebagian besar berawa. Di dekat pantai yang datarannya agak tinggi, kita dapat mejumpai telaga, termasuk danau, segara anakan dan persawahan.³⁷

Taliabu, pulau terbarat, di sebelah timur dimulai dengan lahan perbukitan bergelombang, sementara di tengah lahan pegunungan ini menjulang smapai 1000 meter yang di sebelah baratnya melebar. Pegunungan di sisi barat dan tengah pulau ini memiliki sifat sebuah dataran dengan gundukkan. Lerengnya sangat terjal di pegunungan ini. Hampir di mana-mana pegunungan ini mendekati pantai. Di beberapa tempat perbukitan

³⁶ P. van Hulstijn, (1919), *op.cit.* hlm. 353.

³⁷ *Ibid.* hlm. 354.

berubah menjadi bongkahan karang granit warna merah tua dengan ketinggian beberapa meter. Beberapa dataran rendah dijumpai di sepanjang pantai dan penuh rawa-rawa. Pulau-pulau kecil di sekitarnya sebagian besar rendah, dibangun dari batuan karang, dan terdapat beberapa telaga. Pulau-pulau ini kebanyakan berada di pantai utara dan di barat serta padat dengan hutan bakau, dan dipastikan kita akan sulit menemukan bentangan lahan datar yang luas. Beberapa pulau di pantai selatan lebih tinggi. Banyak sungai kecil yang mengalir dari pegunungan pulau ini menuju laut. Hanya setelah hujan deras, aliran airnya meluap dan membentuk genangan air yang mengalir lembah paling dekat di sepanjang alirannya sampai menuju laut. Untuk memasuki daerah ini, paling tepat kita mengikuti aliran sungai kering hingga mencapai kaki pegunungan. Aliran sungai ini sebagian besar bersifat sungai pegunungan. Mereka di musim hujan menampung sedikit air atau dalam periode hujan rendah sama sekali tidak mengalirkan air. Jika hujan turun dalam beberapa jam, maka dapat dipastikan akan terjadi peningkatan volume air.

Peningkatan volume air disebabkan oleh aliran sungai pendek dan aliran bawah tidak jauh dari batas pegunungan. Tidak lama setelah turunnya hujan, yakni selama 12 jam, kondisi permukaan air kembali normal. Banjir singkat ini sangat deras. Lebar sungai ini di dataran maksimal antara 20-30 meter, dan berkurang semakin ke hulu. Kedalamannya membentang dari beberapa desimeter menjadi meter. Di dataran pantai sungai-sungai ini membentang dengan banyak kelak-keloknya sampai laut, namun kekuatan arusnya tidak begitu besar untuk menembus bendungan pasir yang dibangun di depan sungai oleh

musim. Muaranya melebar dan sungai itu mengikuti pantai di belakang bendungan pasir dalam jarak tertentu. Jenis sungai ini di muaranya berubah menjadi danau. Bila di sepanjang pantai terdapat hutan tropis, tidak ada lagi kolam sungai yang berbatasan jelas. Air menyebar di dalam hutan dan melalui banyak aliran anak sungai campuran mengalir sampai ke laut.

Kolam sungai di aliran hulu terdiri atas timbunan batuan dan karang, sementara air yang kini kembali membentuk ceruk yang dalam mencari jalan keluar dan kembali lenyap. Dengan perkecualian, kolam sungai di sana terbentuk oleh dataran karang. Di perbukitan, kolam sungai terdiri atas batuan karang kecil. Di sini kita hanya menunjukkan bahwa melalui bukti lipatan lama batuan kwarsa dan sebagainya dan melalui lipatan baru dari kandungan mezozoikum, kepulauan Sula memperoleh reliefnya sekarang ini.

Pergerakan tanah mengakibatkan terjadinya keretakan yang beberapa berkaitan dengan sumber air panas. Tanah tidak sepenuhnya tenang yang terbukti dari getaran bumi seperti yang terjadi yang tidak jarang meskipun diduga tidak keras. Sumber air panas ditemukan di Taliabu. Sumber panas khusus yang muncul di dekat Teluk Fargata (S. Mangoli) yang ditemukan kira-kira 150 meter dari pantai dengan kedalaman 3 vadem. Di tempat ini melalui air yang jernih bisa terlihat lobang bergaris tengah beberapa meter yang dari situ air panas menyembur dengan kuat. Aliran bawah tanah jelas terlihat melalui garis biru pada dasar laut. Menurut keterangan penduduk, sumber ini belum lama muncul

dan dari W. Patto yang dahulu bermuara sangat dekat dengan pantai.³⁸

Batubara yang berkualitas buruk muncul dalam jumlah kecil di aliran hulu sungai Fowata (pantai barat Sanana) dan di pulau Sehu. Pantai Sulu Sanana sebagian besar tidak bisa dimasuki di pantai utara dan barat. Di pantai utara, banyak hutan tropis muncul sementara pantai baratnya rendah dan berawa. Pantai selatan dan timur sangat tinggi; pantai sangat padat bongkahan batu dan karang. Pulau Sanana seluruhnya dikelilingi oleh sebuah karang pantai yang di utara sangat lebar dan menyebabkan perahu-perahu pada saat permukaan air tinggi berlayar dekat pantai, di beberapa tempat tertutup oleh karang sehingga cukup aman dari terjangan ombak.

Kondisi pantai yang sulit mempersulit pelayaran perahu di sini. Di dekat kampung, orang menemukan lokasi di mana dalam kondisi cuaca yang tidak buruk pendaratan bisa dilakukan; ini disebut dengan kata Ternate *bobane*. Bagi perkapalan besar, teluk Sesane merupakan satu-satunya yang dengan tenang mendekat, tanpa selalu menawarkan kepastian terutama di musim kemarau.

Kepulauan Sula bagian utara di pantai utara memiliki teluk paling banyak dan ujung paling menjorok, dan jumlah pulau serta karang lebih banyak daripada pantai selatan, sehingga di sana-sini memberikan perlindungan bagi pelayaran. Tetapi pelabuhan alami yang baik hampir tidak ditemukan orang. Kujungan pantai pada umumnya hanya mungkin dalam musim baik dan selama bulan-bulan pergantian musim.

³⁸ *Ibid.* hlm. 355

Iklim di Sula-Sanana dalam banyak hal dipengaruhi oleh pulau-pulau kecil yang berbentuk panjang dan sempit, sebaliknya di sekitar laut seluruhnya terasa, sedangkan keberadaan pegunungan dan perbukitan yang tinggi di malam hari pada umumnya terjadi penurunan tempetarur di luar perkiraan. Pada malam hari di pantai seringkali terjadi dingin yang tak tentu. Dan membutuhkan pelindung tubuh baik yang tak bisa dihindari. Suatu rangkaian suhu yang dilakukan di Sanana di bulan-bulan hangat (Juni, Juli dan Agustus, mencatat angka-angka sebagai berikut. Dari kedua musim musim utara adalah yang terkeras, meskipun pengaruhnya kurang berarti bagi pulau, sehingga daerah bagian sebelah selatan Sula Mangoli dan Taliabu, yang biasanya merupakan lalu lintas laut tidak dapat dilalui pada saat musim utara. Musim selatan mulai terasa sejak pertengahan Mei, yang kian terasa, dimana pada bulan Juli dan Agustus mencapai wilayah yang luas. Diawali dari tenggara, hembusa angin dimulai. Kemudian perubahan cuaca kian meningkat, dimana angin kian dan lebih bertiup di sebelah selatan. Dalam perkembangan ini periode-periode dari kondisi yang semakin atau kurang ditandai, bahkan muncul hari-hari yang tidak ada angin, meskipun jarang.

Pada umumnya angin bertiup pada empat bulan pertama dan bertiup sepanjang 3 hingga 7 hari, dimana peristiwa tersebut lebih disertai dengan hujan. Setelah beberapa hari angin bertiup kurang kuat, angin kian meningkat pada kondisi bulan penuh dan selama 2 hingga 3 hari, dimana setelahnya kekuatannya berkurang. Beberapa hari setelah empat bulan terakhir angin mulai bertiup

dan pada bulan baru angin bertiup kuat; setelah bulan baru kondisi kekuatan angin berkurang.³⁹

Pertengahan September yang masih menuju ke masa peralihan atau pancaroba, angin bertiup dalam ukuran yang kecil di seluruh sisi. Di pertengahan November angin barat laut mulai berpengaruh lebih kuat dan terjadi musim utara, yang mana dilaporkan memiliki karakter seperti angin musim selatan yang mencapai kekuatan terbesarnya pada bulan Januari dan Februari. Angin masih kian bertiup menuju sebelah utara, dimana di daerah ini angin lebih kuat. Pada peretengahan Maret kondisi cuaca memasuki pancaroba, dan jumlah angin sedikit. Selama bulan November hingga Januari terjadi lebih dari sekali, terjadi hujan di bagian barat daya yang secara tiba-tiba. Lama waktunya hanya beberapa hari, kadangkala beberapa jam, tetapi secara tiba-tiba kehadirannya, dan setidaknya sangat dahsyat, berbahaya dan juga berkali-kali menyebabkan kerusakan yang berarti di pantai, yang muncul relatif kecil pada saat musim.

B. Deskripsi Demografis dan Pemukiman;

Kondisi kependudukan di kepulauan Sula pada konteks ini kami deskripsikan berdasarkan situasi penduduk yang terjadi pada era kolonial. Seluruh pencatatan penduduk dideskripsikan menurut laporan para kontrolir. Demikian halnya dengan kondisi

³⁹ Van Bemmelen, direktur Observasi Magnetik dan Meteorologi Kerajaan di Batavia, menjelaskan sebagai: Tidak ada hubungannya antara kekuatan angin di musim timur dengan keberadaan bulan dan kondisinya akan naik turun; dalam tiap-tiap peristiwa seharusnya dilakukan penelitian secara serius, yang mungkin disebutkan peristiwa aneh semacam itu yang sama.

pemukiman yang terdapat dikepuluan Sula. Mengenai perkembangan penduduk Sula pra kolonial tidak dapat kami sajikan mengingat laporan perkembangan penduduk Sula sangat sulit ditemukan pelaporannya.

a. Demografis

Pada umumnya penduduk kepulauan Sula terbagi dalam dua kelompok utama yakni orang Sula yang dianggap sebagai kelompok khusus dan orang Alfur. Orang-orang Sula sejak dahulu terbagi dalam 12 suku atau klan, masing-masing dengan daerah sendiri di suatu bagian daerah pantai dan dengan bahasa yang berbeda. Kedua belas suku atau klan dimaksud yakni;⁴⁰

Falahu	dengan daerah utamanya	Waylau
Mangoli	idem	Mangoli
Fagudu	idem	Way goy eya
Kabauw	idem	Kabauw
Face	idem	T. Baliha
Gay	idem	W. Gay
Ulfola	idem	Ulfola
Bega	idem	Bega
Capalulu	idem	Capalulu
Ipa	idem	Sanana
Wacina	idem	Wacina
Pohi eya	idem	Pohi eya

Di luar klan-klan ini terdapat pula 3 kelompok kecil, dimana membentuk tiap-tiap distrik yaitu Molbufa, Kowabot dan

⁴⁰ F.S.A, De Clercq, (1800), *op.cit.*

Fukuwene. Tiap-tiap klan menempati sebuah bagian daerah panta dimana daerah kekuasaan mereka terlihat menyambung di pedalaman hingga pegunungan. Di daerah kediaman klan terutama sepanjang pantai kebanyakan dari mereka menetap dengan mapan di pedalaman dan sedikit dari mereka yang pergi menuju suatu wilayah (pemukiman) yang sangat kecil dibanding daerah pantai yang telah jelas, namun sebuah pengecualian atas hal ini terjadi pada “orang Fagudu”. Namun pada saat panen di pedalaman untuk kesekian kalinya mereka diizinkan untuk mendirikan desa lainnya di pedalaman. Selama pemerintahan Ternate, pembagian dalam suku tetap dipertahankan. Akan tetapi dalam perkembangan kemudian, walaupun penduduk masih memperhitungkannya tetapi ikatan suku secara perlahan mulai kehilangan banyak kekuatan. Terhadap 12 suku atau klan yang terdapat pada orang Sula, secara spesifik mereka menempati wilayah yang terpisah.

Selain klan utama juga terdapat suku alfur yang bermukim di kepulauan Sula. Orang-orang Alfur dibagi dalam kelompok besar atau kecil baik di pantai maupun di pedalaman. Mereka sangat waspada untuk tunggal di daerahnya sendiri, yang batas-batasnya menurut kesepakatan telah ditetapkan. Meskipun di antara kelompok ini tidak ada perbedaan yang menyolok, toh ada saling kecurigaan dan permusuhan besar. Hanya beberapa suku Alfur yang tinggal pada pemukiman tetap di pantai. Suku Alfur lain hidup mengembara dan paling lama hanya satu bulan tinggal di tempat tertentu. Sebagai akibatnya mereka menganut kehidupan anarkis. Kehidupan mengembara ini ditekuni oleh sebagian suku Alfur, tetapi pemerintah mencoba mengakhirinya

dengan menyuruh mereka tinggal di pemukiman teratur; apakah di pedalaman atau di pantai. Suku-suku Alfur adalah Kadai, Mange dan Seboyo.⁴¹

Suku Kadai menghuni Taliabu timur dan seluruh pulau Mangoli dengan bagian pantai selatan yang dihuni oleh orang Sula. Untuk memenuhi penyerahan wajib kepada Sultan Ternate, terutama kura-kura, dahulu mereka melakukan pengembaraan terutama di sekitar pulau Sula Sanana di mana orang Sula tidak merasa keberatan karena mereka tidak biasa menangkap kura-kura. Di antara orang Alfur, suku Kadai adalah pengembara yang terkenal baik di laut maupun di pedalaman. Suku Manges tersebar melalui pedalaman Taliabu di sebelah barat Mantarara di mana mereka terus-menerus pindah. Mereka tinggal dalam suatu kelompok kecil, biasanya satu keluarga dan saling menjaga jarak. Mereka tidak mengakui kekuasaan dan sebagian besar menolak untuk membayar pajak kepada sultan. Sedikit hubungan dengan dunia luar yang mereka miliki dilakukan lewat orang Seboyo yang masih menjadi kerabatnya.

Suku Seboyo tinggal di bagian tengah pantai selatan Taliabu, di sebelah timur dibatasi oleh suku Kedai dan di sebelah barat dekat Likitobi. Di pedalaman kadang-kadang mereka tinggal; dengan perkecualian mereka tinggal di pantai dalam pemukiman kecil. Mereka berada di bawah kepala yang termasuk kelompok penduduk pribumi. Di pulau-pulau ini ada perbedaan tajam antara orang Islam dan Alfur yang belakangan ini melalui

⁴¹ P. Van Hulstijn, (1918), *op.cit.* hlm. 41.

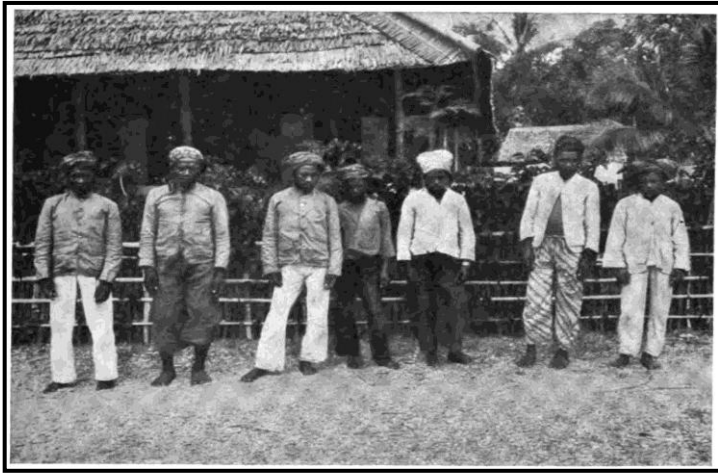
zending memiliki sifat yang berbeda. Likitobi masih menjadi pusat umat Islam.



Suku Mange di Kepulauan Sula
(Sumber: Hulstijn).

Penampilan fisik suku Alfur dan umat Islam di Likitobi masih menunjukkan sifat Alfur dominan. Mereka lebih mudah dibedakan dengan orang Sula yang berwarna kulit lebih cerah. Warna kulit mereka sangat gelap; bentuk rambut pada suku Kadai adn Seboyo terutama keriting. Orang Mange dan umat Islam sebaliknya kebanyakan berambut lurus. Penduduk Taliabu umumnya memiliki sifat yang sama seperti orang Sula tetapi lebih patuh. Mereka pada mulanya tertutup dan dengan perkecualian umat Islam yang tidak terlalu kaku, orang masih bisa mempercayai mereka. Tetapi umat Islam lebih maju. Suku Alfur terlambat memahami, tetapi banyak orang Kadai yang merupakan

perkecualian. Orang Seboyo bersifat dinamis, suka berbicara, sulit diam. Suku Mange bersifat pemalu dan pendiam.⁴²



Suku Kadai,
(Sumber: Hulstijn).

Tingkat peradaban suku Alfur jauh di bawah umat Islam dan orang Sula, terhadap anak-anaknya mereka kurang memperhatikan dibandingkan terhadap anjing dan babinya. Babi kecil berulang kali tampak digendong berkeliling dengan kain. Dalam jumlah bulat seluruh penduduk pulau ini mencapai 15.000 termasuk 12.000 orang Sula. Dari jumlah ini hampir 2 ribu tinggal di pantai Sula Mangoli, dan 10 ribu orang tinggal di Sula Sanana. Bagian utara pula ini berpenduduk paling padat.⁴³

⁴² P. van Hulstijn, (1919), *op.cit.*

⁴³ *Ibid.*

Pelapisan sosial yang sesungguhnya tidak dikenal pada orang Sula. Di masa lalu sesuatu seperti pelapisan sosial banyak terdapat pada orang awam yaitu pembagian dalam kedudukan, meskipun tidak memiliki pemisahan yang tajam di dalam suatu klan. Pembagian kelas yang lebih mengemuka hanyalah dalam bentuk penggolongan Muslim dan Alfur selain itu juga adanya penggolongan dalam kelas tertentu yaitu penguasa dan yang dikuasai. Pada orang Taliabu menjadi *turunan sangaji* dan pejabat tinggi memiliki hak istimewa yang menjadikannya berada di atas orang-orang se-klannya.⁴⁴

Jumlah penduduk penduduk kepulauan Sula menurut laporan dari kontrolir Bacan, terbagi atas warga sultan dan warga pemerintah. Jumlah total tidak dilaporkan, dimana pada beberapa kampung Kadai di Taliabu jumlah penduduk tidak ditelusuri dengan pasti. Jumlah kisaran penduduk mendekati angka 15.000 jiwa, dari mana 12.000 orang adalah orang Sula. Penduduk Sula sendiri mendekati angka 2.000 jiwa pada pantai Sula Mangoli, sehingga sekitar 10.000 penduduk menetap di Sula Sanana. Bagian utara dari pulau ini adalah yang berpenduduk terpadat.

Keberadaan dari etnis Sula pada era kolonial sebagaimana menurut jumlah penduduk secara keseluruhan adalah sebagai berikut: ⁴⁵

Fangoedoe	sekitar	3500	jiwa
Falahoe	sekitar	2500	jiwa
Bega	sekitar	500	jiwa

⁴⁴ P. Van Hulstijn, (1918), *op.cit.* hlm. 37.

⁴⁵ F.S.A, De Clercq, (1800), *op.cit.* hlm. 118

Fatje	sekitar	800	jiwa	
Pohi eja	sekitar	600	jiwa	
Fockoewoe	sekitar	300	jiwa	
Molboefa	sekitar	600	jiwa	
Kabauw	sekitar	600	jiwa	
Gaj	sekitar	100	jiwa	
Waj tina	sekitar	800	jiwa	
Mangoli	sekitar	700	jiwa	
Oelfola	sekitar	250	jiwa	dan
T'japaloeloe	sekitar	450	jiwa	

Jumlah keseluruhan orang Alfur di Taliabu dan Sula Mangoli menurut sensus penduduk yang dilakukan oleh pemerintah kolonial diperkirakan sekitar 2000 jiwa, orang Muslim Taliabu jumlahnya sekitar 800 jiwa. Sebagian besar didominasi oleh orang Alfur termasuk suku Ma'nge. Menurut laporan sebelumnya, jumlah mereka sekitar 600 jiwa. Jumlah pria sekitar 28%, jumlah wanita $\pm$ 25%, jumlah anak laki-laki sekitar 26% dan jumlah anak perempuan $\pm$ 21% dari jumlah keseluruhan penduduk pribumi.

Menurut laporan tahun 1914 jumlah wanita pada orang Sula lebih besar $1\frac{1}{4}$ kali dari jumlah prianya, sebaliknya pada saat bersamaan jumlah anak perempuan $\frac{5}{6}$ kali dari jumlah anak laki-laki. Mungkin fenomena ini berhubungan dengan kondisi umum bahwa sedikit wanita Sula yang turut berpartisipasi dari semua urusan yang kasar dan mengancam nyawa. Pada saat bersamaan kaum wanitanya hanya sedikit yang pergi meninggalkan tanah kelahirannya. Juga pada penduduk di Taliabu dan Sula Mangoli

jumlah wanitanya lebih besar daripada jumlah prianya, sedangkan jumlah anak perempuan lebih sedikit dibandingkan anak laki-lakinya.

Jumlah penduduk di daerah taklukan pemerintah sekitar 900 jiwa, yang di dalamnya termasuk kelompok masyarakat Bajo dengan jumlah mendekati 300 jiwa. Selain itu pada tahun 1917 di Kepulauan Sula menetap 16 orang Eropa dan juga 49 orang Arab dan 50 orang Cina.

b. Pemukiman

Kepulauan Sula terutama pada periode kolonial memiliki, beberapa pemukiman di sepanjang pantai. Dengan perkecualian Sanana, dengan 300 rumah dan Likitobi dengan kira-kira 100 rumah, semua kampung sangat kecil. Di daerah Sula, asal-usulnya dijumpai dari keberadaan pembagian klas atau suku awal. Setiap suku memiliki negeri sendiri, di mana kepala suku dan anggota *soa* (keluarga) memiliki rumah tetapi jarang dihuni oleh mereka. *Soa* lain dari suku yang sama menghuni tempat lain yang saling terpisah. Di suatu lahan *soa*, rumah-rumah saling menyebar.

Hanya di beberapa tempat yang cocok untuk pembukaan kebun, orang menjumpai lebih banyak rumah yang saling berderet. Deretan rumah pendek ditemukan di bagian pemukiman. Jadi kebanyakan negeri dibangun. Sebagian besar suku Alfur Taliabu dan Sula Mangoli pada tahun-tahun lalu tidak memiliki tempat tinggal permanen. Cara bagaimana mereka memenuhi kebutuhan hidupnya disertai dengan kecurigaan antar-suku dan anggota suku, menyebabkan mereka menjalani

kehidupan mengembara (356). Hanya suku Seboyo yang tinggal di daerah tertentu tetapi sekelompok lebih dari dua atau tiga rumah tidak ditemukan di antara mereka. Di antara mereka tidak ada kebutuhan membangun rumah saling berdampingan dan karenanya tidak ada kesatuan dalam membangun rumah. Pemukiman yang baru muncul ini merupakan kumpulan rumah tanpa ada sistem yang saling dibangun di pantai. Keberadaan air yang baik dan memadai tidak pernah berpengaruh besar pada pemilihan tempat bagi suatu pemukiman. Di banyak tempat yang cocok bagi pemukiman, kini oleh orang asing diletakkan bagi pembukaan kebun mereka. Setelah pembuangan Sultan Ternate pada tahun 1915, di mana juga pengaruh birokrasinya tidak ada, di sini perbaikan terjadi dan dengan pembangunan kampung baru atau perubahan kampung lama harus diperhitungkan dengan tuntutan kesehatan.

Di sekitar kampung biasanya terletak kebun; di pekarangan ada pohon kelapa dan pohon buah lainnya. Suatu pinggirian tertentu dari kampung tidak ada lagi; pekarangan sering tidak saling terpisah. Jalan di kampung tidak dijumpai; hanya Sanang, sebuah tempat di teluk dalam di samping jalan pantai memiliki jalan kedua dengan jalan kampung pertama yang dihubungkan oleh jalan. Likitobi sangat tidak teratur di lereng bukit yang terletak di teluk dalam; kampung ini tidak memiliki jalan.

Rumah-rumah sebagian besar berdiri di atas tonggak. Suatu alasan tertentu tidak disampaikan di sini; dan belakangan ini orang juga sering mundur dan mengikuti contoh orang asing. Di

ibukota Sanana rumah-rumah segera dibangun di atas tanah, beberapa dengan lantai berlapis semen. Di likitobi semua rumah berdiri di atas tonggak. Rumah-rumah pada dasarnya dibangun kuat tetapi diabaikan. Sebagai bahan bangunan terutama bambu, gaba-gaba dan atap digunakan. Rumah yang lebih diperhatikan memiliki kerangka dari kayu. Pemukiman Alfur yang muncul belakangan ini karena pengaruh zending sebagian terdiri atas rumah yang layak, sebagian lagi dari gubuk reyot. Di banyak kampung yang dijumpai di bekas ibukota distrik, orang menjumpai rumah pos yang bisa disamakan dengan rumah nagari di Sumatra dan di tempat lain. Mereka dibangun bagi pejabat yang melakukan perjalanan. Rumah-rumah pos di atas tonggak tidak ada lagi. Berulang kali kepala adat menginap di rumah pos atau ditemukan seorang pedagang yang untuk sementara bisa berjualan di sana. Di daerah Islam, orang menemukan di banyak bekas ibukota distrik sebuah mesjid atau langgar. Di pantai selatan Taliabu, beberapa guru zending pernah ditempatkan oleh pemerintah kolonial, di sejumlah pemukiman ditemukan gereja dan rumah guru. Di beberapa tempat di pantai Sula Mangoli dan Taliabu, barak-barak luas ditemukan sebagai tempat penimbunan produk hutan.

C. Lingkungan Ekologi dan Bahasa;

a. Ekologi

Kepulauan Sula dalam teks-teks abad ke-16 dan sesudahnya memiliki status sebagai lumbung pangan dan wilayah transit perdagangan. Status ini dengan jelas dipengaruhi oleh kondisi lingkungan alam yang memadai dan pola hidup

masyarakat. Untuk wilayah transit perdagangan urgensinya ditentukan oleh letak strategis wilayah kepulauan Sula yang berada ditengah jalur pelayaran antar pulau masing-masing Maluku dan Maluku Utara di satu sisi serta wilayah Papua dan semenanjung timur Sulawesi di sisi lainnya. Kepulauan ini secara realistis telah menjadi jembatan alami tetapi terputus-putus yang menghubungkan antara Sulawesi dan Maluku. Ini menjadi alasan mengapa di zaman VOC kapal-kapal Belanda mengenal kepulauan Sula dalam pelayaran dari Sulawesi ke Maluku, meskipun dalam aspek ekonomi mereka kurang mendapatkan perhatian dari para pedagang dan pelaut Belanda dan Eropa lainnya. Tetapi lalu-lintas pelayaran dan perdagangan maritim juga tidak memberi dampak positif terhadap penduduk Sula terutama karena hubungan penduduk baik dengan Ternate maupun Sulawesi yang kurang bersahabat dan sering menjadi sasaran eksploitasi dan perbudakan.⁴⁶ Karena kondisi eksploitasi dan perbudakan serta menjadi salah satu wilayah perompakan di Indonesia Timur telah membuat penduduk kepulauan Sula muncul menjadi orang-orang yang memiliki pola hidup *survive*. Tentunya alam dan kondisi sosial zaman yang juga telah membentuk watak mereka.

Gambaran terhadap fisik dan perilaku mereka telah dijelaskan oleh Hulstijn secara gamblang. Melalui pengamatan seksama terhadap orang Sula terutama pada periode kolonial, Hulstijn menjelaskan sebagai berikut;

⁴⁶ P. van Hulstijn, (1919), *op.cit.*

Orang Sula yang ada di pesisir pantai memiliki tinggi fisik yang sedang, berperawakan sangat kuat, dan untuk penduduk di daerah pedalaman bertubuh tinggi. Warna kulit adalah coklat muda. Meskipun type Alfur muncul pada banyak orang sula, pada kebanyakan orang Sula wajahnya datar dan lebar, dahinya menonjol dan sangat tinggi, berhidung lebar, bibir tipis, dan rahang bulat. Rambut utama hitam dan ikal, pada beberapa orang tampak bergelombang. Banyak orang Sula yang memiliki kumis sedikit; janggut jarang dipelihara. Kaum perempuannya berperawakan baik dan ramping. Orang-orang Sula bersifat tenang, karenanya dengan mudah melepaskan kebiasaan lama dan beralih pada kebiasaan baru, terutama apabila tidak menimbulkan kerugian baginya. Meskipun bersifat ceroboh, tetapi mereka sangat memperhatikan kepentingan dirinya. Mereka sangat memuji hasil kerjanya. Orang Sula tidak bisa disebut malas meskipun dengan berbagai dalih mereka menghindari kerja berat. Khususnya di ibukota, di luarnya penduduk bisa disebut rajin. Orang Sula sangat ramah dan periang; pembicaraannya sangat hidup dan penuh humor. Terhadap rekan-rekannya mereka ramah dan mudah membantu, kepada orang asing mereka sangat hormat, tetapi tidak mudah percaya. Tindakan orang Sula sangat berani. Pencurian sedikit atau tidak pernah terjadi. Dibandingkan pria, kaum wanita masih sangat konservatif. Meskipun dalam posisi tergantung terhadap pria, wanita masih tetap berguna.⁴⁷

⁴⁷ *Ibid.*

Gambaran terhadap fisik dan perilaku penduduk Sula yang disampaikan oleh Hulstijn menjadi landasan argumentasi untuk menjelaskan tentang kondisi historis orang-orang Sula yang bermetamorfosis dengan alam. Lingkungan alam yang subur dengan demikian telah dimanfaatkan oleh mereka untuk memproduksi pangan dalam jumlah yang signifikan. Tantangan lingkungan perairan membuat mereka menjadi pelaut untuk melakukan pelayaran lokal dengan mengunjungi pulau-pulau sekitarnya. Angka-angka migrasi penduduk Sula yang cukup besar di pulau buru memberi indikasi akan adanya pelayaran lokal yang intensif dilakukan oleh orang-orang Sula.

Tantangan alam juga membuat mereka muncul sebagai orang-orang yang tangguh. Kemampuan mereka pada era VOC juga telah diperhitungkan dan nampak jelas ketika kaum bangsawan keraton Ternate dan petinggi VOC mengeksploitasi mereka untuk kepentingan politik dan peperangan .

b. Bahasa

Bahasa yang dipakai di Kepulauan Sula, dapat dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu bahasa yang digunakan orang Sula dan penduduk Taliabu. Di antara kedua kelompok bahasa, baik dalam struktur dan dalam tutur, menandakan suatu kekerabatan yang longgar.

Kesamaan tertentu dengan bahasa-bahasa dari daerah di sekitarnya tidak ada; sebaliknya secara genetik menunjukkan kekerabatan dengan bahasa-bahasa Halmahera. Pepet yang digunakan beberapa kata tidak muncul. Suatu konsonan yang aneh, yang muncul di kedua kelompok adalah c, yang oleh beberapa penduduk di Taliabu diucapkan sebagai sy atau sebagai

s, dimana oleh orang Sula seringkali disebut sebagai z. Sebagai contoh dari penggunaan z yang menyebutkan *face*, juga diucapkan sebagai *fatẓe*, *fatsye*, atau *fatẓei*.⁴⁸

Pada umumnya bahasa diucapkan secara cepat dan sangat tak beraturan. Suatu pengecualian atas hal tersebut dilakukan orang Mange, yang luar biasa lamban, tetapi meskipun begitu juga berbicara tidak jelas. Pada beberapa perkembangan di wilayah linguistik ketetapan bahasa penduduk tidak terjadi, bahkan seringkali diketahui tidak tepat dan ketetapan ada dalam suatu percakapan tertentu, bahkan padanya hampir disertai dengan kesalahan yang terlihat dengan jelas. Di kedua kelompok bahasa banyak muncul berbagai kata-kata asing, dimana alasan yang tepat diwakili dengan kuat oleh bahasa Ternate, tetapi juga menunjukkan banyak kata-kata Melayu Maluku.

Bahasa Ternate diucapkan secara dinamis oleh sebagian besar para pemimpin dan beberapa penduduk pribumi, juga oleh orang *Alfur*. Bahasa Melayu meskipun lebih sedikit, dikenal cukup luas. Bahasa Sula rupanya termasuk dalam kelompok Taliabu, dimana penuturan yang terbalik hanya terjadi pada beberapa orang Sula Taliabu. Bahasa Sula sebagian besar berbeda-beda dalam dialek, terutama yang menandai dalam penyimpangan pengucapan dan berhubungan dengan perbedaan clan-clan di masa lalu. Mereka digolongkan pada dua kelompok, yang juga agak berbeda dalam kosa katanya sendiri.⁴⁹

⁴⁸ *Ibid.* hlm 59

⁴⁹ *Ibid.* hlm. 45.

Untuk kelompok Bahasa Taliabu, juga mengenal dialek, yang kurang atau lebih berbeda. Penggunaan pengucapan yang ada memunculkan banyak kata-kata diantara dialek orang Muslim dan dialek Siboyo. Pada dialek Siboyo kembali menunjukkan kekerabatan yang kuat dengan bahasa Mange. Bahasa Kadai, terutama dalam dialek-dialek percakapan yang disebutkan di atas berkerabat dengan dialek orang Alfur mBono. Selain itu menurut keterangan penduduk adalah bahwa penyimpangan dialek di Taliabu begitu besar, namun mereka dapat saling memahami.⁵⁰

D. Religius: *Animisme, Penyebaran Islam dan Misi Zending*
a. *Animisme.*

Agama awal penduduk kepulauan Sula Sula sama dengan seluruh pulau-pulau di sekitarnya (Halmahera, Seram, Buru, Sulawesi, dsb.) adalah animisme. Oleh karena sebagian besar penduduk kepulauan beralih pada Islam atau keyakinan Kristen, saat ini ditemukan *hedonisme* orang Alfur yang relatif kecil. Mereka yang masih menganut kepercayaan asli masih dapat ditemukan di Taliabu dan Sula Mangoli.

Keyakinan animis adalah segala sesuatu di alam bernyawa. Sebagai akibat dari itu pemujaan mereka pada obyek/benda ragawi/yang dapat dilihat oleh indra (Fetisisme). Pada keyakinan tersebut, roh-roh ini dapat melakukan suatu pengaruh menentukan pada kesehatan mereka dan melahirkan manusia yang digunakan untuk memberi begitu banyak kemungkinan yang menguntungkan dan dipertimbangkan untuk

⁵⁰ *Ibid.*

melakukan pekerjaan penting, yang tanpa padanya telah menggunakan roh-roh, yang dengan ini melalui sarana sesajian, sebagaimana hal lainnya, untuk mendamaikannya. Selanjutnya keyakinan umumnya menyebar pada orang Alfur Taliabu. Pada kelompok ini dipuja banyak *roh-roh yang cukup dihormati*, yang disebut dengan nama Jo-u = yang terhormat – dan ada beberapa lagi, dimana yang lain dalam ukuran yang lebih kecil. Juga suatu *Yang Mulia dari Alam Semesta* dikenal dengan nama Jo-u Kangalang. (Jo=u = Yang Mulia; Kangalang = Bhs. Melayu. Alam = alam).⁵¹ *Djo-oe Mangawaloe* adalah Sang Pelaut atau Sang Pembuat, sekaligus juga yang termulia dari 7 bagian daerah, yang mana terletak di antara tempat tinggal sementara *Bidadari* yang cantik jelita – *Jo-u Hete* – di Halmahera; *Jo-u ma Hutu* – yang memiliki kekuasaan, dan yang membawahi 7 bagian dunia bawah – berada pada kekuasaan *Jo-u Hofo* – yang termulia dari dunia bawah.⁵²

Pada umumnya pemujaan atau yang dipuja orang-orang di kepulauan Sula adalah *wongi*, yang merupakan roh-roh orang yang sudah meninggal. Menurut yang diberitakan seorang Zending, Fortgens, wongi-wongi mereka memberi jalan/cara pada orang-orang yang melakukan perburuan dan pemujaan wongi dan jin pada orang Muslim Ternate. Permohonan pada wongi dalam hal penyakit dinamai orang-orang di Taliabu: *mandalayoin*. Orang-orang melintas dari dalam sebuah putaran

⁵¹ *Ibid.*

⁵² Lihat J. Fortgens. Keempatnya terdapat di dalam *Zendingsarbeid op Taliaboe Mededelingen* dalam *Ned. Zendel. Genootschap* 1915 hlm. 175.

lingkaran dengan wajah terarah ke atas, dimana telapak tangannya dalam kedudukan tertinggi dan lengannya (*bisep*) tertahan di tengah, seolah-olah sedang sembahyang, yang mengarah pada roh-roh halus, dimana bersuara (mengucapkan doa).

Dalam kehidupan orang Sula, dimana saat ini menganut Islam, memberi nama pemujaan dengan *sania*, yang merupakan wongi dari klan, “Urahn”, dimana oleh orang-orang menganggapnya sebagai yang termulia dari tanah – *tuan tanah* – dalam sebuah daerah yang terpenting.⁵³ Dahulu khusus untuk roh-roh ini, orang-orang di tiap-tiap distrik membangun dan merawat sebuah *uma sania* – rumah sania – yang menurut keyakinan mereka telah menjadi tempat tinggal sementara roh-roh ini. Bangunan yang tak bertembok ini dibangun sangat kokoh dan kuat, yang tak bertembok.

Pada keadaan yang biasanya orang Sula dihindari dengan sangat takut pada *uma sania* ini, karena diyakini, bahwa pada malam hari mendengar suara-suara atau dilihat cahaya (jerambang). Sangaji yang baru diangkat atau menerima jabatan mereka harus, mengunjungi *uma sania*. Pada kesempatan ini disajikan seekor kambing, sirih, dan pinang, dan menyanyikan yang dibakar. Setelah itu sebuah pesta dirayakan seluruh klan, cakalele ditarikan dan kemudian juga dilakukan *bil* (tanpa *salay*). Pesta semacam itu juga dirayakan setelah panen yang langsung dirayakan di sekitar *uma sania*, yang mana juga pada kesempatan

⁵³ Pemujaan *sania* sebagai “tuan tanah” menurut van Hulstijn sudah tidak dilakukan oleh orang Alfur. Melalui kata *sania* menjelaskan mereka mengikuti pada roh-roh mereka dari mantra.

ini diserahkan upeti kepada sangaji. Dalam peristiwa epidemi juga dilakukan upacara korban pada roh-roh ini untuk membuat mereka pada akhirnya lebih baik dan penyakit dengan demikian diatasi. Pada akhir-akhir ini di kepulauan Sula hanya sedikit diadakan pemujaan *sania*, Sula: *bau fa nopa* mohi = “perayaan berdasarkan nenek moyang”. Terlebih terjadi kerusakan pada beberapa *uma sania* di pedalaman Sula Sanana, yang ditemukan pada kampung dekat Tanjong Baliha dan Sula Mangoli, sedangkan di masa lalu rumah-rumah ini ditemukan di tiap-tiap distrik. Pesta *sania* terakhir dirayakan belum lama ini di kampung Mangoli. Pada saat itu penduduk telah menjamu *posthoulder*, yang sedang melakukan perjalanan di jalan yang melalui pantai dan membangun sebuah jembatan. Untuk itu dikonsultasikan pertama-tama dengan *sania*. Ini yang diwujudkan oleh yang berkepentingan berfungsi sebagai perantara terhadap nasihat, dan tidak membuat gangguan dari perjalanannya.

Selain *sania* atau roh klan yang juga dipuja roh-roh keluarga yang sangat banyak – dikenal dengan nama wongi. Roh-roh keluarga ini bertempat tinggal dalam sebuah rumah yang sangat kecil – *uma hoga* – yang dibangun di sekitar pantai, atau di pedalaman. Seringkali juga diatur sebuah tempat tinggal bagi roh-roh ini dalam rumah keluarga. Tempat tinggal sementara ini disebut *uma papasia*. Dalam *uma hoga*, pada orang Alfur yang masih animis dibuat sebuah keranjang kecil yang meruncing pada ujung dalam, yang ditempatkan di atas sebuah tongkat) pada beberapa orang Muslim ditemukan kepala manusia yang terbuat dari kayu – *fa nap* – yang bentuknya sendiri seperti yang ditemukan di

Halmahera.⁵⁴ Di dalam rumah tersebut diatur tempat tinggal yang diatur untuk para roh dengan bentuk sebuah perahu kecil, sebuah rumah kecil, atau sesuatu seperti itu. Untuk merawat persahabatan dengan roh-roh orang-orang diharuskan memberi sesajian. Apabila mereka mengabaikannya, roh-roh tersebut akan membalas dendam melalui penyakit dan kesialan. Yang dimiliki oleh *wongi* adalah tempat tinggal sementara di luar rumah, pada suatu tempat yang disebut *uma boga*, selanjutnya orang-orang mempersembahkannya dalam peristiwa suatu penyakit dalam keluarga, yaitu sirih, pinang dan hal-hal seperti itu, dan mengupayakan untuk memperbaiki rumah roh tersebut. Pada masa lalu merujuk pada sesuatu dan yang lainnya menyertainya dengan pesta dan tarian (*cakalele*).⁵⁵

Roh-roh harus dilayani oleh penduduk dan masih terus diberi sesajian berguna untuk menjaga persahabatan. Roh-roh akan membalas dendam pada penelantaran oleh suatu keluarga yang menjadi penyebab penyakit dan kesialan. Untuk *wongi* di *uma papasia*, diatur sebuah pesta yang sama dalam peristiwa seperti itu, yang pada saat tersebut dilakukan tari-tarian – *salay*. Pada kesempatan itu orang yang sakit diperciki oleh orang-orang dengan mangkok atau piring yang telah tua, yang pada akhirnya untuk melindunginya dari balas dendam roh-roh. Roh-roh yang tidak dilayani, dinilai oleh orang-orang menjadi sangat jahat dan

⁵⁴ Pada orang Muslim di Taliabu tidak ditemukan kepala kayu ini. Di Halmahera terdapat dalam bentuk sebuah potongan kepala manusia dan berfungsi sebagai pelindung sebagai pelindung hak milik yang dinamakan “pilogoti”.

⁵⁵ P. van Hulstijn, (1919), *op.cit.* hlm. 47.

berbahaya. Mereka berkelana berputar-putar di dalam hutan sebagai *miki* (di Halmahera disebut *meki*) atau di laut sebagai *hantu lau* (hantu laut). Pada umumnya juga di Hindia dikenal *puntianak* yang ditakuti oleh sebagai penghadang dari wanita yang melahirkan. Sebagai roh-roh yang baik dikenal *bidadari* (persebaran Hinduisme) dan *ka'ipa*. *Ka'ipa* berada dalam kedudukan terhormat untuk menambah hasil panen dari padi yang ditaburkan. Kemungkinan lainnya mereka pergi dari sebuah ladang padi, yang kemudian bersembunyi pada pohon aren dan dengan demikian mengisi air aren melalui kekuasaan yang dimilikinya. Orang-orang membangun tempat tinggal sementara di sekitar ladang padi mereka, sebuah rumah kecil untuk *Ka'ipa*, mengingat cara ini tampaknya untuk menjamin pertolongan mereka. Sebagai dampak dari pandangan animisme, diyakini bahwa penyakit yang terjadi disebabkan oleh pengaruh roh-roh hutan dan keberadaan mereka karena “penanganan penyakit” juga tidak lebih dari pembuangan atau penanggungan roh-roh, yang juga disebut sebagai *wongi make*.

Pada kebanyakan cara yang mudah, dimana biasanya orang terbiasa, adalah dengan mengoleskan atau meludah penderita. Kemudian juga memukul-mukulkan potongan buah kelapa di atas kepala mereka dengan disertai memanggil roh-roh. Selanjutnya juga dioleskan minyak suci, yang dinyatakan, diwariskan dari para leluhur, atau melakukan adat yang bersifat baik, yang mana meletakkan sesajian pada piring tua atau dianggap sebagai kedatangan roh-roh. Piring-piring tersebut diisi dengan air yang digunakan untuk memerciki orang yang sakit. Di

suatu cara atau yang lainnya diiringi beberapa seremonial.⁵⁶ Setelah cara yang digunakan tidak berhasil, orang-orang meminta bantuan dari seorang “dukun/peramal” – seseorang yang diwujudkan dalam sebuah roh – yang diyakini sebagai perantara. Orang-orang menunjukkan mengenai penyebab penyakit dan memperoleh penanganan penyakit. *Ramalan – bau ai* – terjadi melalui cara yang berbeda.⁵⁷

Mereka, yang menginginkan bantuan dukun, pergi pagi-pagi sekali. Kemudian dukun sebuah tongkat atau bambu tipis di atas bakaran menyan, yang diletakkan dengan jangkauan 1 depa dan pada ujungnya diberikan sepotong kecil tali. Setelah membakar menyan mengucapkan nama orang yang sakit, tali dijaga di atas bakaran dan dipasangkan di atas tongkat dengan jarak seukuran tangan. Setelah tanda-tanda yang dipasang dirasakan sesuai, urusan harus dilakukan oleh orang-orang yang terlibat sendiri.

b. *Penyebaran Islam.*

Islam yang telah masuk ke kepulauan Sula sulit untuk ditelusuri. Menurut dugaan Islam ini disebarkan oleh orang-orang Tenate, pada awal abad ke-16 (di Ternate sekitar 1500). Dalam penyebaran Islam di Sula terdapat adanya persoalan yang cukup krusial yang dilakukan oleh sultan. Hal ini muncul ketika pihak kesultanan tampaknya menghambat laju penyebaran Islam di

⁵⁶ Sebagai contoh dari yang disebutkan di atas, bahwa di dekat W. Fangu (pantai utara Taliabu) disebut-sebut merupakan sebuah tempat suci, dimana terdapat sepasang piring, mangkok, dan kendi yang telah tua dijaga di dalam tanah.

⁵⁷ P. van Hulstijn, (1919), *op.cit.* hlm. 48.

beberapa tempat di Sula juga adanya larangan mempelajari atau pembacaan Qur'an – dsb. pada orang biasa. Sementara penduduk dengan antusias dan secara meriah melakukan perayaan seremonial Islam. Halangan ini kemungkinan disebabkan bahwa pengetahuan mengenai Islam di antara penduduk pada umumnya kurang. Para pemimpin juga, dan bahkan dengan pengecualian beberapa pengurus mesjid, kurang melakukan perintah Islam. Di sini beberapa perubahan muncul sejak diakhirinya larangan mengaji oleh pemerintahan kolonil Belanda; sedangkan pada elemen besar penduduk perubahan ini barangkali juga mendorong kemunculan untuk dapat merasa lebih menyerupai orang asing. Beberapa kewajiban agama dilaksanakan sangat baik, antara lain seperti melakukan puasa, membayar *pitrah* di awal bulan Syawal, pembersihan kuburan, dsb. Penegakan agama dilakukan pada menjaga larangan mengkonsumsi daging babi. Pada larangan ini bahkan diberikan tambahan atasnya, dimana babi liar yang berkali-kali menyebabkan kerusakan atas kebun dibunuh dengan tangan sendiri secara khusus.

Perayaan Islam yang di masa lalu dirayakan oleh seluruh penduduk dan dilakukan sejak lama antara lain apa yang disebut *anter bulan*. Pada perayaan ini dipasang 300-400 meja besar yang dihias di dalam mesjid, dimana pada masa kini dirayakan pada ukuran yang lebih terpisah. Jumlah haji pada penduduk pribumi menurut laporan pemerintah kolonial adalah 13 orang. Di daerah tertentu mereka berjumlah sedemikian sedikit sebagaimana orang Arab yang diketahui sedikit. Juga pengaruh dari mereka yang disebut alim ulama sangat kecil. Mengenai mesjid yang berdiri

masih disebutkan satu dan lainnya. Di Sanana dan Likitobi ditemukan sebuah mesjid dengan personil yang digaji. Jumlah mesjid di Sanana ada lima; mesjid-mesjid yang berada di wilayah bekas masing-masing klan, sebagian besar hilang. Di beberapa pemukiman besar beberapa di antara mereka yang disebut ulama berhubungan dengan mesjid atau langgar. Tempat-tempat suci (Sula Taliabu: *jere*) ditemukan di pantai di Sula-Sanana dekat Bega dan di W. Foro, di Sula Mangoli dekat kampung dari nama ini, dan di antara kampung ini dan Waytina; di tempat terakhir kebanyakan adalah tempat-tempat sebagaimana lazimnya untuk membawa sesajian, yang juga dilakukan oleh penduduk Sula-Sanana. Di Taliabu ditemukan tempat-tempat suci di dekat selat Boki, dekat P. Kramat, dan dekat kuala Likitobi.

Berkenaan dengan arti kecil dari keyakinan Islam di antara penduduk Sula, hal tersebut tidak mengherankan, bahwa orang Islam dalam banyak sisi memelihara hampir sepenuhnya menyandarkan atas pandangan hidup animis Alfur mereka, sehingga ditemukan kepercayaan wongi dan penghormatan *wongi* mereka, seperti ikatan masyarakat dan ikatan pulau mereka masih animis. Hampir seluruh mengenai hal itu menyebutkan Alfur (animis), yang juga menyebutkan dalam beberapa ukuran atau ukuran yang lebih sedikit pada orang Islam. Orang Sula dan orang Taliabu (Likitobi) barangkali merupakan jenis-jenis terbaik sebagai orang animis. Selain animisme mereka, masih disebutkan beberapa adat Islam sebagai berikut: puasa, *salad* (sholat), sunat,

pajak agama dan tidak memakan daging babi yang merupakan kebiasaan yang dengan kurang atau lebih sadar diabaikan.⁵⁸

Sejak Utrechtsche Zending Vereeniging menempatkan karyanya di tahun 1912, menyebabkan dibuat propaganda yang lebuah pada keyakinan Islam. Sejak saat itu penduduk pribumi yang animis dari beberapa desa di pantai utara dan barat Taliabu dikonversi pada Islam.⁵⁹ Menurut pemimpin Likitobi, yang menggerakkan aktivitas ini, para leluhur dari anggota masyarakat ini telah menjadi Islam, tetapi kemudian lama kelamaan telah melepaskan Islam melalui pergaulan dengan klan-klan animis di pedalaman. Maka dari itu telah menjadi murtad.

c. Misi Zending

Ketika peralihan kekuasaan dari pemerintahan sultan Ternate ke pemerintah Belanda, pada orang Alfur animis disebutkan adanya kecenderungan cepat pada keyakinan Kristen. Ada kebencian yang umumnya disebarkan orang Muslim yang diduga berperan penting atas hal ini.⁶⁰ Akibat dari tindakan zending adalah bahwa dengan pengecualian beberapa penduduk Kadai, seluruh orang Alfur animis berniat mengenal hingga menginginkan beralih ke agama Kristen. Meskipun orang Kadai tidak seluruhnya menolak Kristen, tetapi hal serupa juga terjadi

⁵⁸ Untuk perayaan Islam dan ritual ditunjukan pada Sub bab: kebiasaan masyarakat.

⁵⁹ Praktek-prektek yang disebutkan tersebut lihat juga artikel J. Fortgens: *Vier weken Zendingarbeid op Taliaboe, Meded. Vanwege het Ned. Zend. Gen.* 1915, hlm. 232.

⁶⁰ Lihat juga artikel J. Fortgens dalam Ibid hlm. 142.

pada agama Islam; mereka menginginkan untuk menjaga adat nenek moyang mereka.

Pengaruh zending saat ini dalam perannya tak dapat disangkal masih belum berarti, tetapi dicapai hasil-hasil yang baik. Di sini masih tahap pendirian dan diberikan perhatian atasnya. Orang Alfur juga memperlihatkan pengaruh pada beberapa perkembangan atas wilayah keagamaan. Oleh penduduk pemukiman, yang masih belum ada *guru*, selalu didesak atas penempatan seorang perintis (*guru* Kristen). Sementara itu,⁶¹ setelah kepergian detasemen eksplorasi militer rupanya sikap penduduk berkenaan dengan agama Kristen sangat berubah. Orang liar pada saat kehadiran militer disampaikan hidup berpindah-pindah dan berkumpul dalam kampung yang besar, yang pada saat bersamaan ada kesempatan untuk menerima pendidikan dari guru-guru yang telah hadir. Sesudah militer berangkat, penduduk berpaling kembali pada kehidupan berpindah-pindah lama mereka di dalam hutan.

Para guru yang juga harus berkarya di bawah pengawasan orang Eropa, tidak seluruhnya ditempati. Dari pendirian zendeling orang Eropa di tempat tersebut rupanya belum dapat dibicarakan karena komunikasi sangat kurang, dan juga pada saat bersamaan Utrechtsche Zendings Vereeniging belum memiliki kaum zendeling. Dampak dari seluruh hal ini adalah keputusan U.Z.V. untuk meninggalkan langkah ini dengan

⁶¹ Bagian ini diambil pada sebuah nota yang ditulis Zendingdirector J. W. Gunning mengenai Sula tertanggal 1917 pada penyebab perjalanan inspeksinya di tahun itu juga.

karya yang dimulai mereka di kepulauan Sula. Sementara itu dilakukan usaha-usaha oleh persekutuan ini yaitu membaptis penduduk pribumi oleh kaum zendeling mereka kemudian menjaganya melalui gereja Indische.

E. Sistem Pemerintahan

Kepulauan Sula ditaklukkan oleh kesultanan Ternate sekitar tahun 1570. Dibawah kekuasaan kesultanan Ternate, pemerintahan tertata menurut system kesultanan. Untuk menjalankan kekuasaan di kepulauan Sula, Sultan menempatkan Salahakan yakni jabatan setingkat Gubernur.⁶² Salahakan sendiri merupakan jabatan kekuasaan yang sengaja diciptakan oleh Sultan dan jabatan ini secara spesifik berada dibawah keluarga Tomaitu. Hak pengangkatan Salahakan dari keluarga Tomaitu dilatarbelakangi oleh andil keluarga Tomaitu atas penaklukan Sula pada abad ke XVI.⁶³ Karena bercirikan kesultanan, Salahakan biasanya dalam menjalankan kekuasaan menggunakan pakaian seperti orang Arab.⁶⁴

Salahakan yang menerima menerima sertifikat penunjukkan dari Residen dalam tugasnya dibantu oleh pejabat-pejabat Ternate, yaitu Jurutulis, seorang *Kapita-krois*, seorang Kapiten-kota, dan beberapa tentara. Jurutulis juga sebagai pemimpin keagamaan. *Kapita-krois* adalah kepala pelabuhan dan kapiten perahu layar, dengan awak yang terdiri dari 20 pelaut yang

⁶² Leonard Y, Andaya, *Dunia Maluku, Indonesia Timur Pada Zaman Modern Awal*, (terj: Septian Dhaniar Rahman), (Yogyakarta: Ombak, 2015), hlm. 79.

⁶³ *Ibid.* hlm. 97.

⁶⁴ P. van Hulstijn, (1919), *op.cit.*

disediakan oleh kampung-kampung yang bergantian setiap 3 bulan.

Selain Salahakan sebagai pimpinan tertinggi struktur kekuasaan terendah juga dibentuk. Sangaji merupakan penguasa yang berada dibawah struktur Salahakan. Seorang *sangaji biasanya mempin kaln*, meskipun pekerjaannya adalah pemimpin masyarakat yang sebenarnya, yang merupakan bawahan sultan Ternate pada pengurusan penarikan pajak dan peradilan. Menurut kepercayaan rakyat ia merupakan bapak pemimpin masyarakat di bawah kedaulatan Sultan. Setelah menerima jabatan pimpinan tersebut ia adalah pemimpin yang sebenarnya.

BAB III

KEPULAUAN SULA SEBAGAI WILAYAH VASAL KESULTANAN TERNATE.

Wilayah Kesultanan Ternate, yang terbentang dari pantai timur Sulawesi hingga sebagian besar wilayah Maluku atau pada titik ordinat 141°L.⁶⁵ Luasnya wilayah kekuasaan Ternate menggambarkan adanya supremasi politik dan kekuasaan yang sangat dominan. Keraton Kesultanan Ternate dan ibu kotanya sebagai pusat kekuasaan berada pada pulau kecil di sepanjang pantai di lereng pegunungan sebelah timur, dan berakhir di daratan kecil di sisi pulau menuju pantai.⁶⁶ Pusat kontrol kekuasaan memang berada pada pulau kecil tetapi hal ini tidaklah membelenggu penguasa Ternate untuk melakukan ekspansi wilayah guna membentuk kesatuan wilayah vasal yang luas di kawasan Timur Indonesia.

Terdapat beberapa alasan mengapa Ternate muncul sebagai kesultanan yang tangguh dengan wilayah kekuasaan yang luas, pertama, perebutan pengaruh politik di Timur Indonesia dengan kesultanan Tidore. Kedua, sumber keuangan kesultanan yang memadai untuk mendanai ekspansi kekuasaan. Hampir sebagian besar sumber keuangan kesultanan didapatkan dari ekspansi cepat perdagangan cengkih pada akhir abad ke-15 dan 16. Dan ketiga, munculnya sosok Sultan yang memiliki jiwa

⁶⁵ F.S.A. de Clercq, *Bijdragen tot de Kennis der Residentie Ternate*, (Leiden: E.J. Brill, 1800), hlm. 1.

⁶⁶ *Ibid.*

ekspansi, misalnya Sultan Baabullah anak dari Sultan Khairun Jamil yang mampu membawa Ternate menuju puncak kejayaan dengan wilayah kekuasaan yang luas. Baabullah menjadi Sultan yang bertanggung jawab terhadap penaklukan seputar wilayah Sulawesi dan Maluku. Selain itu beberapa pembantu Sultan atau *fala raba* dari keluarga Tomagola, Marsaoli, Limatahu dan Tomaitu yang ikut mendukung proses ekspansi wilayah kekuasaan.

Kepulauan Sula yang secara geografis berdekatan dengan Ternate dalam perspektif ini tidak luput dari perhatian. Dapat dipastikan bahwa keluarga Tomaitu yang bertanggung jawab terhadap penaklukan kepulauan Sula. Penaklukan yang dilakukan oleh keluarga Tomaitu terhadap kepulauan Sula sebagai wujud kesetiaan mereka terhadap Sultan. Mencuatnya nama keluarga Tomaitu sebagai penakluk Sula tidak lepas dari adanya hak penentuan jabatan Salahakan yang memimpin kepulauan.

Selama berada di bawah penguasa Ternate, eksploitasi wilayah dan penduduk menjadi fenomena historis yang mengemuka. Kondisi inilah yang kemudian menimbulkan adanya situasi geopolitik yang tidak menentu. Kepulauan Sula sering menjadi tempat pelarian politik bangsawan Ternate, misalnya jika adanya suksesi dilingkaran keratin kesultanan dan ini terutama terjadi pada abad ke 16. Mengenai apa dan bagaimana situasi Sula selama menjadi vasal kesultanan Ternate secara kontekstual akan kami jelaskan dalam sub bab 3 naskah ini;

A. Menjadi Wilayah Vasal

Terhadap penaklukan kepulauan Sula untuk selanjutnya menjadi wilayah vasal telah memunculkan adanya dikotomi. Menurut Valentyn, Sula berada di bawah kesultanan Ternate pada tahun 1330 melalui Moloma Tsyeya.⁶⁷ Sementara Hulstijn yang banyak menulis laporan mengenai kepulauan Sula mengemukakan bahwa kepulauan Sula ditaklukkan oleh Ternate sekitar tahun 1570.⁶⁸ Pada perkembangan kemudian, Sula sempat berada dibawah pengaruh kesultanan Bacan tetapi pada tahun 1742 seluruh pulau ini dikuasai kembali oleh Ternate.

Sesungguhnya pendapat Valentijn mengenai penaklukan Sula pada tahun 1330 bukanlah kebenaran mutlak tetapi harus diuji kebenarannya. Secara prinsip penetapan angka tahun yang dikemukakan oleh Valentijn dapat saja berada pada ruang probabilitas dalam kebenaran karena ia sempat bertugas di Ambon pada era VOC dan informasi mengenai Maluku Utara sebagian besar diterimanya langsung dari informan Ternate yang cukup akurat seperti salah seorang informan dari keluarga Tomagola yang memberikan uraian pada Valentijn mengenai sejarah Maluku Utara.⁶⁹ Informasi ini kelak sangat besar

⁶⁷ Penguasa ini disebut *Ngolo Macayu* di Ternate, ia hanya menduduki singgasana pada tahun 1350, untuk lebih jelas lihat penjelasan F. Valentyn, *Uitvoerige beschryving der vyf Moluccos* (Dordrecht: Joannes van Braam Boekverkoopen, 1724), hlm. 138.

⁶⁸ P. van Hulstijn, *Het Soela Eilanden*, (Tijdschrift van Economische Geographie, 1919), hlm. 358.

⁶⁹ Lihat penjelasan F. Valentyn, *Uitvoerige beschryving der vyf Moluccos* (Dordrecht, Joannes van Braam Boekverkoopen, 1724).

manfaatnya terhadap rekonstruksi Sejarah Kesultanan Ternate pada periode-periode awal. Akan tetapi apabila mencermati dengan seksama penetapan tahun penaklukan Sula yang dikemukakan oleh Hulstijn kiranya tidak dapat dikesampingkan. Hulstijn cukup lama tinggal di Sula dan banyak melakukan eksplorasi atas kepulauan Sula. Jika pendapatnya dikorelasikan dengan konteks periode ekspansi wilayah yang dilakukan kesultanan Ternate kiranya tahun penetapan penaklukan Sula dapat diterima kebenarannya karena abad ke 15 merupakan periode puncak kejayaan Ternate. Ledakan perdagangan rempah abad ke XVI,⁷⁰ sangat mempengaruhi kejayaan Ternate. Kekayaan yang diperoleh sejak abad ke 15 hingga 16 telah membuka ruang yang luas untuk dilakukannya ekspansi wilayah guna membentuk wilayah teritorial.

Proses penaklukan Sula pada kenyataannya tidak dilakukan langsung oleh Sultan tetapi oleh salah satu dari kelompok *Fala Raha* atau yang kerap disebut sebagai *Bobato*. *Fala Raha* merupakan keluarga kraton yang sangat prestisius yang disatu sisi sering merepotkan sultan dalam pemerintahannya tetapi mereka juga dalam banyak hal telah membantu kesultanan dalam menjalankan pemerintahan termasuk ketika proses ekspansi wilayah kekuasaan. Bahkan muncul pendapat yang menyatakan jika sesungguhnya ekspansi awal Ternate tidaklah dilakukan oleh Sultan tetapi dipimpin oleh Fala Raha, yang terdiri dari keluarga

⁷⁰Anthony Reid, *Asia Tenggara Dalam Kurun Niaga 1450-1680 Jilid 2: Jaringan Perdagangan Global*, (terj. R.Z. Leirissa dan P. Soemitro), (Jakarta: Komunitas Bambu, 2011), hlm. 1.

Tomagola, Tomaitu, Marsaoli, dan Limatahu.⁷¹ Khusus untuk Sula, pada akhir abad ke-15 keluarga Tomaitu memimpin sebuah ekspedisi ke Kepulauan Sula dan membawanya menjadi lingkungan pengaruh Ternate. Karena tindakan ini Tomaitu diangkat sebagai *salahakan* atau gubernur Sula dan mendirikan suatu keberadaan orang Ternate yang permanen atas pulau Sula Besi. Di akhir abad ke-17 keluarga Tomaitu secara berangsur-angsur digantikan oleh Tomagola namun kemudian dipulihkan apagenya.

Pada awal abad ke-16 keluarga Tomagola memperluas pengaruh Ternate ke Buru. Di bawah Samarau cabang Buru dari keluarga Tomagola menjadi sebuah kekuatan dominan dalam apa yang Belanda sebut sebagai Bagian Ambon, yang termasuk pulau Buru, Ambelau, Manipa, Kelang, Boano, Seram, Seram Laut, Nusalaut, Honimoa (di Saparua), Oma (di haruku), dan Ambon.⁷² Bagian ambon melanjutkan untuk mengakui pertuanan nominal Ternate melalui Tomagola, meskipun pada akhir abad ke-17 pemerintahan gubernur telah dialihkan dari keluarga Tomagola ke VOC.⁷³ Baik Marsaoli dan Limatahu tidak membangun apange di pinggiran, kemungkinan karena mereka menjalankan pengaruh yang besar di pusat. Pada abad ke-17 Marsaoli sering menempati posisi jogugu, dan *kimalaha* Marsaoli menjadi sinonim dengan salah satu pegawai yang paling terkemuka di kerajaan. Yang

⁷¹ Leonard Y, Andaya, *Dunia Maluku, Indonesia Timur Pada Zaman Modern Awal*, (terj: Septian Dhanir Rahman), (Yogyakarta: Ombak, 2015), hlm. 79.

⁷² *Ibid.*

⁷³ *Ibid.*

penting selanjutnya setelah Marsaoli mungkin adalah Limatahu,⁷⁴ meskipun sumber-sumber dari periode ini secara relatif tak menyebutkan aktivitas mereka. Masih dalam konteks penaklukan Sula oleh Ternate dan juga daerah-daerah lainnya, Leonard Andaya dalam bukunya, *The World of Maluku : Eastern Indonesia in the Early Modern Period*, menjelaskan bahwa pada tahun 1576 Babullah mengirim Rubohongi dari keluarga Tomagola menuju Hoamoal, Buru, Manipa, Ambelau, Kelang dan Boano untuk menaklukan daerah-daerah ini dibawah perlindungan Ternate. Pilihan Baabullah terhadap Rubohongi mengarah untuk memimpin ekspedisi merupakan pemilihan yang cermat karena ayahnya Samarau dipersalahkan oleh Babullah telah mengijinkan segalanya menjadi kacau di sana.

Pada tahun 1580 Babullah mengirimkan kora-koranya untuk bergabung dengan kapal layar bersama dengan perahu-perahunya dari Sula. Armada gabungan ini berlayar ke Sulawesi Utara, Ke Tobunku dan Tioro dan menaklukan tempat-tempat ini dengan Ternate. Mereka menakhlukan Wolio di Buton di Butung dan berangkat ke Selayar dimana mereka menandatangani sebuah perjanjian dibawah penguasa kerajaan Makasar di Gowa. Sebagai hasil dari kampanye ini, Babullah dikenal;”Penguasa 72 Pulau”.⁷⁵

B. Geopolitik Sula Pada Era Kesultanan Ternate

Sejak wilayah Sula ditaklukan oleh Ternate tahun 1330, kendali kekuasaan segera dicurahkan oleh para sultan dan kaum

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ *Ibid.*

bangsawan. Tindakan kekuasaan yang paling dominan diperlihatkan oleh Ternate dengan melakukan eksploitasi terhadap penduduk Sula. Tindakan ini dilakukan untuk menjadikan Sula sebagai wilayah yang mendukung kekuatan politik kesultanan. Akan tetapi haruslah dicermati bersama bahwa kemampuan Ternate untuk menempatkan Sula sebagai wilayah vasal sangat ditentukan oleh kekuatan maritim Ternate. Jarak jangkau Sula cukup dekat dan berada pada lintas pelayaran menuju Seram, Ambon, Buru, dan Banda. Ternate telah memperluas wilayah pengaruh hingga ke Seram, Ambon dan Buru. Sula dengan demikian menjadi wilayah yang harus dikuasai dan penguasaan ini tidak saja konteks kepentingan Ternate untuk membangun kekuatan maritim dengan memanfaatkan penduduk wilayah vasal tetapi juga sebagai sumber kekuatan ekonomi kesultanan.

Kepulauan Sula karena keterpencilannya, dulunya menjadi tempat persembunyian yang paling disukai bajak laut yang menyeberang dari kepulauan Obi.⁷⁶ Perlu dipertegas juga, selama masa-masa perompakan, penduduk kepulauan Sula sering menjadi sasaran bajak laut. Berdasarkan teks-teks dari era VOC, perompakan yang terjadi di Sula sebagian besar dilakukan oleh bajak-bajak laut Papua. Gerak pelayaran lokal laut Maluku yang menjadi jembatan penghubung ke Papua dan wilayah sekitarnya, jangkauan antar wilayah yang cukup dekat telah memudahkan bajak bergerak dengan leluasa dan melancarkan perompakan terhadap daerah-daerah yang lemah kekuatan pertahanannya.

⁷⁶ P. van Hulstijn, (1919), *op.cit.* hlm. 353.

Sekalipun masih perlu dibuktikan dengan seksama terhadap migrasi penduduk Sula ke pulau Buru dan Seram. Pada konteks probabilitas, kondisi politik yang terjadi di Keraton seperti misalnya adanya suksesi, sangatlah mempengaruhi kondisi kepulauan Sula. Keterisolasiannya telah menjadi tempat yang digunakan oleh pelarian politik Ternate dan ini sebagian besar terjadi pada era kekuasaan VOC.

C. Peran Wilayah Menurut Agenda Kesultanan

Sula dalam struktur kesultanan menjadi wilayah lumbung pangan. Penetapan Sula didasarkan atas kondisi alamnya yang memang sangat subur selain juga ketersediaan hutan-hutan sagu serta tenaga manusia untuk menjadi pekerja wajib.

Eksplotasi penduduk untuk menjadi pekerja wajib sangat realistis terjadi pada era Sultan Baabullah. Dalam sebuah laporan pastur Jesuit Marta kepada Gomez Pirez, gubernur Filipina (pada tahun 1590-1593), seperti dikutip oleh Argensola disebutkan bahwa wilayah vasal Ternate yang terdiri atas 72 pulau menyetorkan upeti berupa sejumlah besar tenaga sebagai bentuk penyerahan wajib. Berdasarkan laporan Jesuit Marta, Kepulauan Sula telah menyumbangkan 4.000 orang tenaga kerja wajib bagi Sultan Baabullah yang nantinya akan menjadi tenaga tempur.⁷⁷

Sultan Ternate mewajibkan penduduk Sula untuk menyerahkan upeti tahunan berupa beras, sebanyak 15 koyang atau *last*. Beban kerja wajib bagi penduduk Sula selama menjadi

⁷⁷ P.A. Tiele, *De Europeers in den Maleischen Archipel* Bagian V : 1578 – 1599, (BKI, tahun 1881, volume 29), hlm. 161

daerah vasal Ternate terjadi secara kontinu. Selain menjadi tenaga tempur, penyerahan tenaga kerja wajib diperlukan melakukan penebangan dan pengangkutan kayu, pembuatan dan perbaikan perahu kora-kora sultan serta membuka lahan-lahan perkebunan cengkih.⁷⁸

D. Salahakan dan Sangaji : Struktur Kekuasaan Wilayah Vasal

Telah disinggung sebelumnya bahwa pembentukan Salahakan sebagai pengendali kekuasaan di kepulauan Sula dan berada di bawah Sultan memiliki hubungan yang kuat dengan proses penaklukan Sula oleh klen Tomaito. Dalam menjalankan pemerintahan di Sula, Salahakan musyawarah dengan dengan seluruh *Sangaji* – pemimpin negeri. Sebagai petunjuk diberikan sebuah “catatan” dari sultan, terutama yang berisi ketentuan kontrak dengan pemerintah dan kemudian beberapa urusan yang mengatur, yang termasuk pada *atoran* yang telah ada sejak lama. Bagian yang tak tertulis dari *atoran* – (adat) – ini merupakan yang terpenting bagi urusan dalam negeri pulau. Pada adat ini masih dijelaskan oleh para pemimpin masyarakat, yang meletakkan adat, yang melakukannya pada kepentingan mereka.⁷⁹

Kepentingan sultan untuk wilayahnya terbatas pada hasil-hasil pulau dan terbukti tidak mengabaikan semua tugas dari

⁷⁸ C. Van der Hart, *Reize rondom het Eiland Celebes en naar Eenige der Moluksche Eilanden* (‘s Gravenhage: K. Fuhri, 1853), hlm. 120.

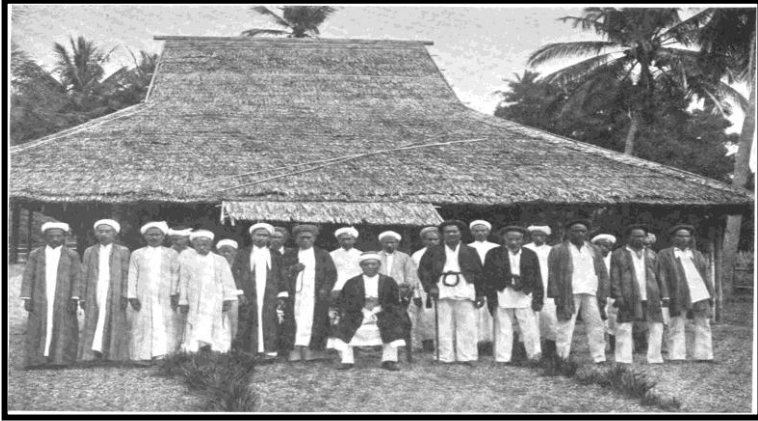
⁷⁹ P. Van Hulstijn, *Memorie over de Soela-Eilanden* dalam *Encyclopedisch Bureau, Aflevering XV*, (Weltevreden: N.V. Boekhandel Visser & Co. – 1918), hlm. 107.

setiap orang; *salahakan* melambangkan kepentingan sultan atas hal tersebut. Pengurusan pajak adalah tugas utamanya, kemudian ia juga harus mengawasi, dimana tokoh masyarakat tidak memiliki banyak kekuasaan yang diambil alih oleh sultan. Pada yang disebutkan terakhir ini sultan mewajibkan *sangaji* di Sanana untuk bertempat tinggal, dimana telah memiliki *salahakan*, yang memiliki sedikit hubungan dengan *sangaji*.⁸⁰

Kedudukan *salahakan* sangat agung, ia merupakan pejabat pertama kesultanan, dimana ia masih dikelilingi oleh banyak seremonial, yang diperlakukan menyenangkan dengan penuh rasa hormat oleh para kepala negeri. Meskipun ia menyebutkan *atoran*, ia seringkali dibantah oleh *sangaji* yang menentrangi dengan keras. Sebagai akibat dari tugasnya ia memberikan, daripada melakukan pendakwaan beberapa laporan anonim pada sultan. Hal ini, terutama untuk menjaga persahabatan pemimpin masyarakat, menempatkan pembesar-pembesarnya dalam ketidakteraturan yang oleh karena itu beberapa dibebaskan dari kedudukannya. *Salahakan* berdiri di dalam sisi pekerjaannya dibantu oleh beberapa pemimpin Ternate yaitu: seorang jurutulis sekaligus pendeta tertinggi, kapitan krois yang memegang perintah atas *kora kora* dan berfungsi sebagai penguasa pelabuhan, dan kemudian *kapitein kota*, yang berkuasa atas sedadu – *kabo* dan juga bertindak sebagai ajudan *salahakan*. Para pemimpin Ternate tinggal bersama sama di benteng tua di Sanana. Biasanya setelah seorang

⁸⁰ *Ibid.* 108.

Salahakan purna tugas ia diharuskan meninggalkan Kepulauan Sula.⁸¹



Salahakan dan Sangaji
(Sumber: Hulstijn).

Jabatan *sangaji* dapat diwariskan, sejauh dimana ia masih berasal dari wilayah yang sama, atau, pada desa-desa besar yang ditunjukkan dari keduanya, dimana berasal dari *soa*. Dari kedudukan *bobato* dibentuk sejenis seleksi, dimana menurut adat masih terdiri dari pemimpin *soa*. Calon *sangaji* dipilih dari saudara dekat *sangaji* sebelumnya; diberi penghormatan pada masih anak-anak, yang disebut sebagai saudara. Pemilihan ini dibawa persetujuan sultan, yang berlaku sebagai aturan. Pengangkatan yang berlangsung di Ternate, disertai dengan perayaan besar. Sebagai tanda jabatannya para pemimpin yang baru diangkat

⁸¹ *Ibid.*

dihadiakan sebuah ikat kepala dan sebuah tongkat. *Sangaji*, para pemimpin dari distrik Molbufa, Kowabot dan Fukuwu, diangkat oleh *salabakan*.



Sangaji Fatje dan Bobato Baliha,
(Sumber: Hulstijn).

Kedudukan *sangaji* di daerahnya sama seperti seorang pangerang. Oleh pengikutnya ia desbut dengan *Jo'o* – yang mulai, sebuah gelar yang hanya menjadi hak bagi para pembesar Ternate. Ia dihormati secara tegas dengan *atoran*, dimana ia juga hanya melakukan pekerjaan yang terkecil; juga menyebutkan menghindari pekerjaan wajib.

Orang di atas dan *orang di bawa* menjadi perbedaan *sangaji* Falahu dan Mangoli, sebagaimana yang diamati. Hal ini menjadi kondisi yang sesuai dengan sifatnya hingga kecemburuan besar, yang masih diangkat oleh ketentuan bahwa salah satu dari

keduanya mengambil tempat di dalam pertemuan para pemimpin atas sebuah kursi di samping *salabakan*. Siapapun yang berbahagia, diberikan pada kejadian yang diharapkan; yang berarti ia merupakan, yang muncul pertama. Kedudukan tinggi *sangaji* semata-mata digunakan untuk keuntungan pribadi. Mengenai pemerintahan tidak dibicarakan, dimana mereka masih tetap mempertahankan *atoran*. Ini berarti hanya semata-mata pada pembatalan di sekitar hal-hal yang menghasilkan kewajiban dan apa yang berhubungan antara satu dengan lainnya, yang mana penduduk telah begitu tertindas dan mungkin untuk mempertahankan kebodohan.

Kekuasaan *sangaji* bersandar atas rasa takut, dimana dari kecenderungan yang melekat pada kepribadian mereka tidak dibicarakan. Pemerintahan ini beberapa kali ditentang oleh daerah taklukan mereka. Mereka juga mengatur atas sarana kebutuhan untuk menggiring perlawanan pada tujuan lainnya. Di luar negeri kedudukan *sangaji* dianggap sangat kecil; penulis catatan telah menandai beberapa kali hal ini sebagaimana ia diantar keluar oleh *sangaji* keluar wilayah kekuasaannya.

BAB IV

KEPULAUAN SULA PADA ERA VOC (1602-1799)

Kehadiran orang-orang Belanda di Maluku telah membawa perubahan peta politik dan perdagangan. Pembentukan VOC tahun 1602 untuk memperkuat supremasi Belanda atas wilayah kepulauan Maluku dan mengontrol sepenuhnya perdagangan rempah baik cengkih maupun pala dan fuli. Keterlibatan Belanda telah memicu terjadinya perubahan politik dan ekonomi yang ekstrim. Eskalasi konflik dengan penguasa Maluku, perang dan perebutan pengaruh antar sesama orang-orang Eropa dan juga penduduk Seram, Ambon dan Banda menjadi fenomena sejarah yang mengemuka. Tanpa mempertimbangkan hak-hak penguasa pribumi dan penduduknya, orang-orang Belanda memaksakan kehendak demi mewujudkan apa yang kita kenal sebagai *grand design* (desain besar) politik atas Asia dan implementasi ekonomi mikro yang berbasis monopoli pasar dalam perdagangan rempah.

Perubahan peta politik dan ekonomi yang terjadi di Maluku sebagai dampak dari kehadiran orang-orang Belanda telah membawa pula wilayah kepulauan Sula. Belanda yang kemudian membentuk kongsi dagang VOC pada 1602 memaksa Sultan Ternate untuk menyerahkan kontrol wilayah Sula, Seram, Buru dan Ambon. Walaupun Sultan dan para bangsawannya merasa

keberatan terhadap keinginan VOC tetapi perjanjian tahun 1601⁸² membuka peluang dimaksud karena Ternate sesungguhnya mengharapkan dukungan Belanda dalam perang melawan Portugis dan Spanyol. Suatu keberuntungan bagi Belanda karena ditengah konflik dengan Spanyol pada 9 Agustus 1609 terjadi kesepakatan *Antwerpen* antara kedua kerajaan. Perjanjian ini memberi kebebasan berdagang di kepulauan Maluku bagi orang-orang Belanda. Surat dari Parlemen Belanda yang ditulis dari Den Haag pada tanggal 16 September 1609 memberitahu Sultan Ternate akan kesepakatan kedua kerajaan sehingga konflik dengan kesultanan Tidore segera dihentikan.

Setelah berkuasa, kepulauan Sula menjadi wilayah yang juga ikut dikontrol oleh VOC. Walaupun pejabat-pejabat VOC tetap membiarkan pemerintahan Sula berjalan menurut sistem kesultanan tetapi eksploitasi wilayah dan penduduk kembali intensif dilakukan. Oleh VOC, Penduduk Sula juga masuk dalam agenda penyerahan wajib. Dalam teks-teks laporan dari era VOC membuktikan adanya penggunaan tenaga orang-orang Sula dalam perang di Huamual. Wilayah Sula juga mendapat pengawasan ketat setelah monopoli perdagangan dipraktikkan oleh VOC. Pembangunan benteng *Verwachting* di Sanana tahun 1736, sebagai bentuk kontrol wilayah yang dilakukan oleh orang-orang Belanda.

⁸² M. Dassen H.J.Zoon, *De Nederlanders in de Molukken*, (Utrecht: W.H.Van Heijningen, 1848), hlm. 35.

A. Kehadiran Belanda di Maluku Utara.

Pada abad 16 dan sebelumnya, pergerakan kapal dari Eropa ke Asia dan Maluku Utara sangatlah ditentukan oleh angin musim tropis. Angin barat-barat laut yang berhembus dari Desember sampai Maret membawa kapal-kapal India dan Cina ke Indonesia dan kapal-kapal Indonesia ke kepulauan rempah. Lamanya waktu tiupan menentukan lamanya waktu bagi pelayaran maritim; dengan angin Timur-Tenggara dari April sampai September menjadi masa akhir pelayaran ke Maluku dan selanjutnya kapal-kapal memulai perjalanan kembali ke India dan Cina. Pelayaran orang-orang Belanda ke Asia dan selanjutnya kepulauan Maluku tanpa kecuali, juga sangat ditentukan oleh pergerakan angin.⁸³

Menurut Rumphius, pada fase awal pelayaran maritim ke Nusantara, orang-orang Belanda berstatus sebagai pedagang-pedagang lepas yang tidak terhimpun dalam suatu kongsi dagang. Pada perkembangan selanjutnya, pelayaran kapal-kapal Belanda ke Asia masing-masing berada dibawah dua kongsi dagang yaitu kompeni tua dan kompeni yang baru. Masing-masing kongsi dagang mengutus kapal-kapalnya ke Hindia untuk membeli rempah-rempah.⁸⁴ Armada dagang pertama yang dikirim berada di bawah komando Admiraal Jacob Cornelis van Neck yang terdiri dari 8 buah kapal. Wakil komandan armada itu adalah Wijbrandt

⁸³ J.C. Van Leur, *Indonesia Trade and Society*, (Bandung: N.V. Mij Vorkink Van Hoeve, 1960), hlm. 158.

⁸⁴ Rumphius, *De Ambonsche Historie*, (S-Gravenhage; Martinus Nijhoff, 1910), hlm. 19.

van Warwijck. Armada ini bertolak meninggalkan negeri Belanda pada tahun 1598.⁸⁵



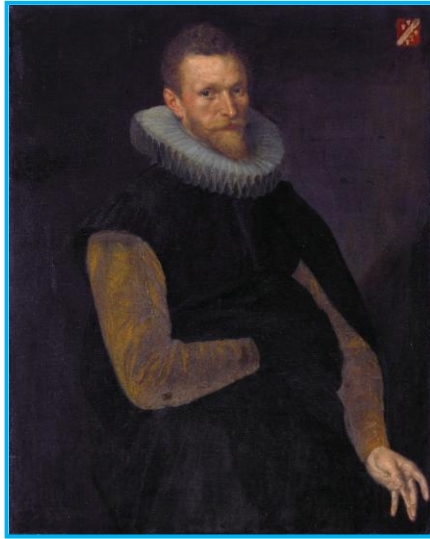
Rute Timur menuju
ke Kepulauan Rempah. Rute ini terhubung
langsung ke Filipina.⁸⁶

Untuk pelayaran perdana mengunjungi Nusantara, dilakukan pada 5 Juni 1596 oleh kongsi dagang Amsterdam. Pada pelayaran perdana, Belanda menggunakan empat buah kapal dan berada dibawah navigator Cornelis de Houtman. Dalam pelayarannya, Houtman sukses mendekati pantai barat Sumatra. Delapan belas hari kemudian mereka mencapai pelabuhan Banten

⁸⁵ *Ibid.*

⁸⁶ Robert Parthesiu, *Dutch Ships in Tropical Waters; The development of the Dutch East India Company (VOC) shipping network in Asia 1595-1660*, (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2010), hlm. 52.

di Jawa barat daya. Ketika menjatuhkan jangkarnya, beberapa pedagang Portugis mengunjungi mereka di kapal sebagai bentuk penghormatan. Orang-orang Portugis menjelaskan pada mereka mengenai kondisi pulau Jawa dengan kekayaan alamnya. Setelah beberapa saat kemudian orang-orang Portugis meninggalkan kapal dan sebagai bentuk penghormatan, orang-orang Belanda menembakkan meriam sebanyak tiga kali.⁸⁷



*Lukisan ilustratif dari Jacob Corneliszoon
van Neck.⁸⁸*

⁸⁷ H.M. Vlekke, *Nusantara: Sejarah Indonesia*, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2008), hlm. 119-120.

⁸⁸ Sumber gambar: *Koleksi Rijksmuseum*.

Pada saat kunjungan ke Banten tahun 1594, kongsi dagang Amsterdam membuka hubungan dengan Banten. Akan tetapi pada situasi yang bersamaan, mereka terlibat konflik dengan penguasa Banten dan orang-orang Portugis dari Malaka. Konflik ini terjadi karena adanya orang-orang Portugis terhadap para penguasa Jawa untuk melawan orang-orang Belanda.⁸⁹



Lukisan ilustratif dari Jacob
*Heemskerck.*⁹⁰

⁸⁹ J.C. Van Leur, *Indonesian Trade and Society; Essays in Asian Social and Economic History*, (Bandung: N.V. Mij Vorkink-Van Hoeve, 1960), blm. 144.

⁹⁰ Sumber gambar: *Koleksi Rijksmuseum*.

Pelayaran Belanda ke Maluku dilakukan oleh Wijbrand van Warwijk atas perintah Jacob Corneliszoon van Neck.⁹¹ Dalam pelayaran ke Maluku, Warwijk dibantu Jacob Heemskerk dalam status sebagai wakil laksamana, dia berangkat pada tanggal 8 Januari 1588 dengan kapal *Amsterdam*, *Zeeland*, *Gelderland* dan *Utrecht* dari Banten menuju Ambon.⁹² Misi pelayaran ke Ambon berhasil dilakukan dimana pada 3 Maret mereka tiba di perairan Ambon.⁹³

Setelah tiba di Ambon, Warwijck yang terlibat konflik dengan orang-orang Portugis, membagi armadanya menjadi dua eskader. Eskader pertama yang terdiri atas tiga buah kapal diperintahkan berlayar menuju kepulauan Banda dan eskader kedua yang berkekuatan dua buah kapal diinstruksikan berlayar ke Ternate.⁹⁴ Jacob Heemskerk yang memegang komando atas pelayaran ke Ternate memberangkatkan kapal *Amsterdam* dan *Utrecht* pada tanggal 6 Mei 1599. Setelah menempuh pelayaran selama beberapa hari, mereka akhirnya memasuki pelabuhan Ternate pada tanggal 22 Mei 1599.⁹⁵ Oleh Sultan Ternate, kedua kapal Belanda ini diawasi secara dekat dengan menggunakan kora-kora.

⁹¹ Rumphius, (1910), *op.cit.* 19.

⁹² W.R. Van Hoevell, *De Moluksche Eilanden*, Zalt-bommel: Joh. Noman en Zoon, 1856), hlm. 104.

⁹³ Rumphius, (1910). *op.cit.* 20.

⁹⁴ *Ibid.*

⁹⁵ W.R. Van Hoevell, (1856), *op.cit.* hlm. 104.

Sementara itu Heemskerck yang berniat menjalin hubungan diplomatik, segera turun ke darat dan memberikan hadiah pada penguasa Ternate. Pemberian hadiah pada Sultan merepresentasikan sikap politik dan persahabatan. Heemskerck dalam status sebagai warga Belanda tentu menginginkan hubungan diplomasi yang baik dengan Ternate sekaligus untuk memudahkan akses bagi orang-orang Belanda dalam melakukan perdagangan rempah dengan Ternate.



Lukisan ilustratif mengenai pertemuan
Hemskerck dan Sultan Ternate. Lukisan ini di muat dalam buku
perjalanan Van Neck.⁹⁶

⁹⁶ Keuning, *De tweede schipvaart der Nederlanders naar Oost-Indië onder Jacob Cornelisz van Neck en Wybrant Warwijck, 1598-1600*, (s'Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1944), hlm. 67.

Sikap diplomatis yang diperlihatkan oleh Heemskerck, mendapat tanggapan positif. Karena permintaannya pada Sultan mengunjungi kapalnya direstui. Ia bahkan memberikan sambutan meriah terhadap sultan. Sultan Ternate yang memang sedang membutuhkan sekutu baru untuk menghadapi orang-orang Portugis dan Spanyol meminta pada laksamana Heemskerck untuk meninggalkan beberapa anak buahnya di Ternate, dengan tujuan mengawasi proses penjualan cengkih. Dengan senang hati usul Sultan diterima dan Heemskerck memerintahkan Frank van der Does disertai lima orang pelaut lainnya tinggal di Ternate. Kecurigaan terhadap orang-orang Belanda yang pada mulanya sempat ditunjukkan oleh Sultan menjadi hilang dan hubungan baik kini terjalin.⁹⁷ Laksamana Heemskerck juga menerima salam perpisahan raja ketika akan melanjutkan pelayarannya kembali ke Belanda.

Sesudah Heemskerck, ekspedisi lanjutan ke Maluku Utara dilakukan oleh Laksamana Jacob Corneliszoon Van Neck. Dengan menggunakan armada berkekuatan dua buah kapal masing-masing kapal *Amsterdam* dan *Gouda*, Van Neck segera melakukan arung samudera menuju Maluku Utara untuk memenuhi permintaan Sultan Ternate yang kini telah menjadi mitra politiknya. Pada tanggal 2 Juni 1601, kedua van Neck memasuki pelabuhan. Sebagai bentuk antusiasme, terhadap kehadiran kedua kapal Belanda, Sultan dengan didampingi oleh Frans van der Does segera naik ke atas kapal untuk menyambut Laksamana Van Neck.

⁹⁷ W.R. Van Hoevell, (1856), *op.cit.* hlm. 116.

Kehadiran Van Neck di Maluku Utara yang kemudian membangun kemitraan dengan orang-orang Ternate, terpantau oleh orang-orang Portugis. Secara spontanitas, Portugis memberikan peringatan keras terhadap Sultan Ternate agar seger mengusir mengusir orang-orang Belanda dari wilayah mereka. Peringatan Portugis sebagai bentuk kekhawatiran akan munculnya pesaing baru yang lebih tangguh dan dapat menyingkirkan mereka dari Maluku Utara. Munculnya keberanian Portugis untuk menuntut Sultan Ternate disebabkan oleh adanya empat buah kapal mereka yang baru tiba. Dengan memperhitungkan kekuatan angkatan lautnya, Portugis memprediksi akan mampu menghalau armada Belanda tanpa mempertimbangkan postur kekuatan kapal-kapal perang yang dikomandoi oleh Laksamana Van Neck. Sebagai petualang, Van Neck tentu tidak akan mau membiarkan mitranya Ternate berada dalam ancaman serius Portugis. Sehingga ia mengerahkan kekuatan penuh untuk menghancurkan armada Portugis yang berpangkalan di Tidore.

Sekalipun dengan armada yang sangat terbatas kekuatannya, Laksamana Van Neck selaku pemegang komando bagi armada kapal Belanda dipastikan akan tetap melancarkan serangan sporadis terhadap Galeon Portugis yang berada di pelabuhan Tidore. Serangan ini, secara sepintas terlihat sangat sederhana dalam skala penggunaan kekuatan armada tempur laut. Tetapi bagi Van Neck yang terpenting adalah ia mampu meletakkan dasar bagi misi politik jangka panjang Belanda di kepulauan rempah. Terbukti bahwa sebelum penyerangan dilancarkan, ia meminta restu dari Sultan Ternate. Permintaan dukungan langsung pada Sultan sebagai bentuk kesungguhannya

untuk mempertahankan status quo Ternate di Kepulauan Maluku sekaligus menciptakan adanya ketergantungan Sultan terhadap orang-orang Belanda. Bagi Ternate tentu hal ini akan berdampak pada teritori politik mereka karena Sultan telah tersandra oleh kepentingan politik Belanda.

Penyerangan terhadap kapal-kapal Portugis berhasil dilakukan oleh Van Neck. Atas keberhasilnya, Sultan Ternate memberikan akses yang luas bagi kapal-kapal Belanda untuk melakukan perdagangan cengkih di wilayah Maluku Utara.⁹⁸ Setelah pertempuran, Laksamana van Neck tanggal 31 Juni atas seijin sultan segera berangkat ke Patani di pulau Halmahera, untuk mengambil muatan cengkih dan selanjutnya melanjutkan pelayaran ke Eropa. Sebelum berangkat ia meninggalkan Jan Pieterszoon sebagai *koopman* di Ternate. Setelah ekspedisi yang sukses dari Van Neck, ekspedisi lanjutan segera dilakukan oleh orang-orang Belanda. Yang tercatat kemudian adalah arung samudera bulan Februari tahun 1602 yang dilakukan oleh Laksamana Wilphert Harmenszoon. Pada tanggal 2 Mei 1603, Laksamana Cornelis Sebastiaanszoon dengan lima kapal juga melakukan pelayaran ke Ternate.⁹⁹ Setelah pelayaran Cornelis Sebastiaanszoon, orang-orang Belanda makin mengintensifkan pengiriman kapal-kapal ke Ternate. Pelayaran yang dilakukan oleh Laksamana Matelief, van Caarden, Laksamana Muda Wittert, dll. Menjadi pembuktian akan kesungguhan mereka untuk mengontrol perdagangan rempah di Maluku Utara dan

⁹⁸ W.R. Van Hoevell, (1856), *op.cit.*

⁹⁹ *Ibid.* hlm. 117.

bukan sekedar hanya untuk memenuhi permintaan penguasa Ternate.

B. Wilayah Sula di Bawah VOC : Antara Penyerahan Mandat dan Ekspansi

Setelah membuka hubungan diplomatik dengan kesultanan Ternate, dan sukses menyingkirkan Portugis dan Spanyol dari Maluku Utara, orang-orang Belanda mulai menyusun rencana sistematis untuk melemahkan kekuatan politik kesultanan Ternate. Perjanjian politik tahun 1601,¹⁰⁰ menjadi awal dimulainya rencana mengendalikan kekuasaan di kepulauan Rempah. Perjanjian dengan sultan Modafar (sultan ke 27) yang merupakan penguatan atas perjanjian yang sebelumnya telah dibuat antara Belanda dan Ternate mengenai penetapan harga cengkih dan juga hak pembelian rempah makin mempertegas adanya upaya orang-orang Belanda untuk mengontrol penuh perdagangan rempah. Walaupun konteks perjanjiannya hanya sebatas pada upaya monopoli perdagangan cengkih tetapi dampaknya sangat besar terhadap hak-hak kekuasaan.

Pada konteks politik, Sultan Modafar terlihat tidak cerdas dalam membaca rencana petinggi VOC di Maluku apakah karena ia terlalu muda dan kurang memahami kondisi politik dan perilaku orang-orang Belanda, tetapi yang jelas pemikirannya terlalu bersandar pada rasa kekhawatiran dan hutang budi pada orang-orang Belanda yang telah membantu Ternate dalam perang

¹⁰⁰ M. Dassen H.J.Zoon, *De Nederlanders in de Molukken*, (Utrecht: W.H.Van Heijningen, 1848), hlm. 35.

melawan Portugis dan Spanyol di Maluku Utara. Bagi petinggi VOC, persetujuan sultan Modafar menjadi pijakan yang kuat untuk mendapatkan kekuasaan di seluruh Maluku. Pada awal tahun 1612, Pieter Both diangkat sebagai gubernur jenderal pertama di Ternate. Pada saat yang sama ia memangku jabatan sebagai gubernur Maluku. Selama pemerintahannya, maupun penggantinya Gerrit Reinjt dan Laurens Reaal, kontrak dengan penduduk dan penguasa pribumi diperluas. Penduduk Bacan dan Makian ikut terseret dalam perjanjian yang penuh dengan misi politik dan misi perdagangan.

Peluang terbesar bagi VOC, untuk mengontrol kekuasaan di kepulauan rempah secara realistis terjadi setelah Spanyol menarik diri dari persaingan di Maluku Utara. Berdasarkan konteksnya, orang-orang Spanyol mengakhiri tekanan terhadap kedudukan VOC di kepulauan Maluku karena pertimbangan politik dan strategi. Selain kematian Gubernur Don Juan de Silva¹⁰¹ dan kekalahan Spanyol dalam perang kemerdekaan Belanda di Eropa pada abad ke 16, faktor lainnya adalah adanya upaya Spanyol untuk mengamankan jalur pengiriman perak dari Amerika Tengah ke Philipina. Penguasa Spanyol menganggap bahwa upaya mempertahankan Ternate untuk kepentingan perdagangan rempah tidaklah efisien untuk dilakukan karena nilai perdagangan perak waktu itu juga cukup tinggi. Selain itu ancaman bajak-bajak Laut Sulu terhadap pertahanan mereka di Ternate dan Manila menyebabkan mereka haruslah mengkonsentrasikan kekuatan penuh di Philipina yang menjadi

¹⁰¹ W.R. Van Hooevell, (1856), *op.cit.* hlm. 125.

sentral penampungan perak dan sekaligus pencetakan uang untuk standar tukar global. Untuk itu melalui pertimbangan pada akhirnya seluruh pasukan Spanyol ditarik dari kepulauan Maluku.

Mundurnya Spanyol dari kepulauan Maluku, menjadi keberuntungan bagi VOC dalam meraih pengaruh kekuasaan. VOC kini hanya tertuju konsentrasinya pada permusuhan yang dilakukan oleh penguasa Ternate dan para bangsawannya. Walaupun perlawanan sering terjadi terhadap VOC tetapi secara keseluruhan tidak mampu meruntuhkan pengaruh kekuasaan VOC di Maluku. Petinggi VOC akhirnya secara leluasa menata kekuasaan berdasarkan cara-cara yang mereka kehendaki.

Pelemahan kekuasaan kesultanan Ternate dan juga kesultanan lainnya di Maluku Utara telah mempengaruhi seluruh wilayah vasal. Kepulauan Sula yang menjadi wilayah kekuasaan kesultanan Ternate juga ikut terseret dalam pengaruh kebijakan VOC. Dengan demikian hak-hak eksploitasi penduduk dan kendali wilayah Sula dapat dilakukan oleh VOC melalui mandat dari kesultanan Ternate yang memang secara struktur telah melemah. Bagi petinggi VOC, kepulauan sula dipandang sebagai wilayah transit pelayaran dan pengawasan selama berlangsungnya praktik monopoli perdagangan rempah. Seperti halnya Ternate, Penduduk Sula juga diharuskan oleh VOC untuk menyediakan pekerja wajib. Wilayah Sula bagi VOC dijadikan sebagai lumbung pangan untuk melayani kebutuhan penduduk di daerah-daerah lainnya di Maluku.

C. Dinamika Politik Sula Pada Fase Awal VOC;

Bertentangan dengan heterogenitas masyarakatnya dan untuk waktu yang singkat, pemerintahan kesultanan Ternate selama berabad-abad telah memberikan berbagai pengaruh terhadap penduduk Sula. Terkadang pada situasi tertentu kesultanan menciptakan *image* (kesan) buruk terhadap penduduk Sula sehingga berpengaruh terhadap tatanan kekuasaan pribumi. Putra mahkota yang hendak menjaga prestise pada batas-batas tertentu telah memaksakan kepentingan mereka pada penduduk sula.

Walaupun masih dalam tataran tentatif, tetapi teks-teks abad ke 16 mengisyaratkan adanya tekanan putra mahkota kesultanan Ternate terhadap penduduk untuk menjalankan sekaligus melindungi asset perdagangan mereka di kepulauan Sula.¹⁰² Seringnya penyerangan yang dilakukan oleh penduduk Sula mengindikasikan adanya kebentcian terhadap putra mahkota. Dan VOC selalu bertindak untuk melindungi setiap putra mahkota yang diancam keselamatannya oleh penduduk Sula. Apabila kita dengan cermat menganalisa kebijakan politik VOC di Maluku, baik yang berkedudukan di Ambon maupun di Ternate, pada prinsipnya mereka menerapkan kebijakan polarisasi terhadap para putra mahkota. Disatu sisi mereka melindungi putra mahkota demi menghindari sikap permusuhan dari sultan dan kaum bangsawan Ternate sedangkan disisi lainnya mereka sangat

¹⁰² P. Van Hulstijn, *Memorie over de Soela-Eilanden* dalam *Encyclopedisch Bureau, Aflevering XV*, (Wetevreden: N.V. Boekhandel Visser & Co. – 1918), hlm. 117.

tidak menginginkan pangeran-pangeran tersebut bertambah kuat, yang akhirnya dapat mengancam eksistensi kongsi dagang VOC. Polarisasi kebijakan ini kemudian dianggap pada era kekinian sebagai sistem “pecah belah dan kuasai” dalam segala konsekuensinya.¹⁰³

Pada saat periode awal VOC di Maluku, Sultan Ternate mendapatkan hasil politik yang efisien dalam bentangan daerah mereka, untuk apa mempersiapkan peralihan, oleh karena pemerintahan mereka kekurangan cara-cara untuk melakukan sarana bersenjata. Meskipun barangkali hal yang terjadi lebih tidak disengaja, yang meletakkan sistem ekspor dengan baik. Yang jelas bahwa VOC telah menawarkan diri untuk melindungi Ternate dan vasal-vasalnya dan sebaliknya Ternate larut dalam pelayanan VOC sehingga tidak lagi memobilisasi angkatan perang secara besar-besaran sebagai kesultanan berdaulat. Kesultanan secara penuh telah bergantung pada kekuatan militer VOC.¹⁰⁴ Sehingga hak-hak primordial yang sangat absolut dalam politik Ternate menjadi dikesampingkan dan ini sangat membahayakan posisi peran Ternate dalam percaturan politik di Nusantara. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kepulauan Sula merupakan daerah taklukan kesultanan Ternate.

Sultan, sangat mengharapkan dukungan penuh dari penduduk kepulauan Sula terhadap Ternate. Akan tetapi karena eksploitasi, telah menimbulkan antipati terhadap orang-orang Ternate. Letaknya yang terisolasi, telah menyebabkan kontrol

¹⁰³ *Ibid.*

¹⁰⁴ *Ibid.*

kesultanan Ternate sangat tidak efisien. Petinggi VOC membaca benar situasi ini sehingga lebih leluasa dalam membuat kebijakan politik yang sepihak. Postur kekuatan Ternate yang berbasis pada wilayah-wilayah vasal terlihat melemah. Dan ini dimanfaatkan oleh VOC untuk mengambil pengaruh Ternate.

D. Sula Pada Masa Praktik Monopoli



Lukisan ilustratif mengenai
hukuman mati di Ambon yang dilakukan
VOC terhadap *Kimelaha Terbile*.¹⁰⁵

Selama praktik monopoli perdagangan rempah berlangsung, kondisi politik Sula terkadang sangat tidak menentu. Sula sering menjadi tempat pelarian politik bagi bangsawan Ternate. Pada saat VOC menerapkan kebijakan *hong- ekstirpasi* untuk mengamankan posisi monopoli rempah, kepulauan Sula

¹⁰⁵ F. Valentyn, (1724), *op.cit.* hlm. 302.

terkadang menjadi hambatan tersendiri bagi VOC. Pemberontakan rakyat yang muncul di Seram dan tempat lainnya di sekitar Ambon, yang hampir rata-rata terjadi karena hasutan para kimelaha sangat sulit untuk dinetralisir oleh VOC.

Para Kimelaha yang gagal dalam aksi-aksi pemberontakan terhadap VOC, sering menjadikan Sula sebagai tempat pelarian atau perlindungan. Arnold de Vlaming yang menjadi gubernur Maluku tahun 1647,¹⁰⁶ telah merasakan hambatan dimaksud. Pemberontakan Saidi dan Majira pada tahun 1652 dan 1653, dan pada tahun-tahun berikutnya menjadi pembuktian adanya peran SDula sebagai tempat perlindungan para Kimelaha. Terkadang pemberontakan yang dilakukan oleh para Kimelaha menyebabkan Kepulauan Sula lepas dari kontrol kekuasaan VOC, seperti yang terjadi pada akhir tahun 1656 dimana Sula jatuh di bawah kendali Mandarsyah.¹⁰⁷

Pemberontakan lainnya yang juga terjadi di Sula dan kemudian merepotkan VOC, berlangsung pada pertengahan abad ke 17. Kimelaha Terbile yang menjadi Salahakan merasa tidak puas terhadap Sultan dan Kompeni, melancarkan pemberontakan di Sula. Untuk memadamkan aksi pemberontakan, de Vlaming membakar beberapa desa. Terbile terdesak dan akhirnya berhasil

¹⁰⁶ Rumphius, *Ambonsche Landbeschrijving*, (Jakarta: Arsip Nasional, 1980).

¹⁰⁷ F. Valentyn, *Uitvoerige beschryving der vyf Moluccos*, (Dordrecht: Joannes van Braam Boekverkoopen, 1724), hlm. 88.

ditangkap dan diekstradisi ke Ambon untuk selanjutnya dijatuhi hukuman mati.¹⁰⁸

Pemberontakan Terbile memberi dampak buruk bagi penduduk kepulauan Sula. Penguasa VOC akhirnya pada tahun 1652 memaksakan kesepakatan terhadap penduduk Sula. Kemudian kesepakatan kedua diputuskan pada 23 November 1681. Di bawah ketentuan-ketentuan kontrak tersebut, semua kebijakan mengenai Sula berada dibawah kedaulatan Kompeni.¹⁰⁹ Setelah kesepakatan dibuat, VOC menempatkan seorang sersan dan beberapa petugas keamanan untuk mengawasi wilayah Sula dan penduduknya. Tindakan pengawasan terhadap Sula juga dilakukan untuk meredam aksi-aksi perompakan yang memang masif terjadi. Setelah Sula berada dalam kontrol, hampir dipastikan, seluruh penduduk Sula tunduk dan patuh pada ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh VOC.¹¹⁰

Selama berlangsungnya monopoli, VOC telah menggunakan penduduk Sula sebagai tenaga tempur. Penguasa Sula atau Salahakan, atas permintaan VOC mengirimkan sembilan perwira utama (yang disebut *kavaileros*) ke Seram dengan untuk membantu VOC memenangkan perang atas orang Luhu. Kavaleros Sula yang melibatkan diri dalam perang meminta pada VOC agar mereka kiranya dapat mengambil beberapa kepala orang Luhu yang telah menjadi korban dalam pertempuran. Akan

¹⁰⁸ F.S.A. de Clercq, *Bijdragen tot de Kennis der Residentie Ternate*, (Leiden: E.J. Brill, 1800), hlm. 122.

¹⁰⁹ *Ibid.*

¹¹⁰ *Ibid.*

tetapi lewat perundingan, mereka tidak dianjurkan untuk meneruskan kebiasaan mereka dalam menggunakan kepala manusia sebagai ritual.¹¹¹

Pada beberapa kasus pertempuran, VOC selalu menggunakan tenaga tempur pribumi dalam menumpas aksi-aksi pemberontakan. Pertempuran yang terjadi sepanjang praktik monopoli selalu diwarnai dengan adanya mobilisasi tenaga tempur pribumi seperti yang dilakukan dengan penduduk Sula dan orang-orang Alifuru yang bagi VOC dianggap loyal. Sebagian besar laki-laki yang masuk kategori sebagai tenaga tempur sering didata. Hal dimaksudkan agar VOC dapat dengan mudah mengeksploitasi mereka untuk keperluan pertempuran dan kerja wajib.

E. Pelayaran Dan Perdagangan Lokal : Ambon-Sula-Ternate-Banggai

Perdagangan lokal yang terjadi di kepulauan Maluku dengan menggunakan jalur laut lebih efisien karena kondisi geografis kepulauan. Penduduk yang sebagian tinggal di pulau kecil telah bermetamorfosis menjadi masyarakat maritim. Walaupun pelayaran terbatas, tetapi perdagangan antar pulau telah membawa adanya migrasi penduduk dari satu tempat ke tempat lainnya dan ini kemudian membentuk ikatan-ikatan tradisional yang memiliki kesamaan. Mitra dagang sering

¹¹¹ P.A. Tiele, *Bouwstoffen voor de Geschiedenis der Nederlanders in den Maleischen Archipel* ('s Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1890), hlm. 33.

dilakukan antar kelompok-kelompok pedagang dari berbagai etnis. Tentu hal ini untuk menghilangkan kecurigaan dan ketakutan yang disebabkan oleh perompakan.¹¹² Perkawinan juga menjadi sarana penting untuk menghilangkan sikap saling curiga. Kucurigaan yang terhapus dapat memberi dampak positif bagi perdagangan antar pulau di Maluku.

Dalam hubungan perdagangan antar pulau selain penduduk Maluku yang membentuk jaringan perdagangan lokal, keterlibatan kelompok pedagang asing terutama pedagang Cina dan Bugis tidak dapat diabaikan. Peran mereka sangat besar dalam memainkan arus pelayaran dan perdagangan lokal sehingga mempercepat terbentuknya jaringan perdagangan lokal di kepulauan Maluku. Jika dibandingkan dengan pedagang Eropa, pedagang Cina dan Bugis mobilitasnya sangat tinggi. Mereka dalam aktifitasnya membaur dengan pedagang-pedagang kepulauan Maluku. Pedagang Bugis dan Cina telah mengunjungi kepulauan Maluku dan melakukan transaksi perdagangan rempah. Khusus untuk pedagang Makassar, pergerakan kapal-kapal dagang mereka telah menjangkau Weda, Obi, Akelamo, Makian, Mayu, berbagai tempat di Halmahera timur laut dan kepulauan Sula.

Orang Maluku lebih suka membawa rempah mereka ke sejumlah tempat lain untuk dijual kepada para pedagang Makasar, yang menawarkan rempah lebih baik daripada orang Eropa. Di Luhu di semenanjung Hoamoal di Seram, orang Ternate menolak untuk membawa cengkih mereka kepada orang Belanda, dan

¹¹² Leonard Andaya, *Local Trade Networks in Maluku in The 16th, 17th, and 18th Centuries*, (*Cakalele*, vol. 2, nomor 2, tahun 1991), hlm. 72.

sebaliknya mengangkutnya melalui pegunungan ke Lesidi dan Erang di mana cengkih itu dijual kepada orang Makasar demi beras dan budak.¹¹³

Setelah VOC mengontrol kepulauan Maluku dan menerapkan monopoli perdagangan rempah, jaringan perdagangan lokal mendapat pengawasan ketat. Pedagang Makassar, Bugis, dan Cina yang sebelumnya melakukan perdagangan terbuka dengan penduduk Maluku harus menerima nasib buruk. Mereka dilabelkan oleh VOC sebagai pedagang gelap karena menentang sistem monopoli. Pedagang Makassar yang membantu terciptanya jaringan perdagangan lokal di Maluku pada akhirnya terhambat pergerakannya. Tindakan VOC berdampak buruk terhadap jaringan perdagangan lokal di kepulauan Maluku. Konflik terbuka tidak dapat di hindari dan ini dengan jelas menghambat aktifitas perdagangan lokal antara penduduk kepulauan Maluku dan pedagang Makassar, Bugis dan Cina.

Pada saat VOC melakukan praktik monopoli, pelayaran antar pulau yang dilakukan oleh penduduk Ambon dan sekitarnya dengan pulau Sula dan Banggai ramai berlangsung. Akan tetapi seluruh aktifitas pelayaran dan perdagangan lokal antara Ambon dengan Sula dan Banggai diatur menurut mekanisme VOC. Pada tanggal 20 Februari 1693 Gubernur mengizinkan orang-orang Ambon berlayar kembali ke Sula dan juga ke Banggai tetapi dengan syarat tertentu. Pada tahun 1694 penguasa VOC juga mengizinkan penduduk Ambon melakukan pelayaran ke Sula dan Banggai dan ijin ini dihentikan lagi oleh Jan van Oosten dan

¹¹³ *Ibid.* hlm. 73.

Henrik ten Veldhuizen tahun 1695.¹¹⁴ Kebijakan pelarangan untuk aktifitas pelayaran lokal dari Ambon ke Sula dan Banggai masih berlaku pada tahun 1696. Masih dalam 1696, Gubernur berdasarkan surat tanggal 1 Maret lewat *Princeland*, pelayaran kembali mengizinkan dibukanya pelayaran dari Ambon ke Sula dan Banggai.¹¹⁵

Kebijakan VOC untuk mengatur arus pelayaran lokal dari pelabuhan Ambon menuju Sula serta Banggai dan sebaliknya sangatlah ambiguitas. Dan kebijakan ambigu ini makin nyata pada tahun 1690, ketika sikap Gubernur yang hanya mengizinkan pelayaran bagi orang-orang Ambon (menurut surat tanggal 15 Februari 1690) dan memproteksi pelayaran ke Sula dan Banggai bagi orang-orang Buru dan Amblauw.¹¹⁶ Karena pelayaran yang menghubungkan Ambon-Sula dan Ternate serta Banggai yang berlangsung selama bertahun-tahun menghadapi banyak bahaya, penguasa VOC di Ambon menganjurkan pada Mandarsyah untuk sementara menghentikan adanya pengiriman utusan. Pada tahun 1673 VOC melarang orang-orang Sula untuk melakukan pelayaran ke Ambon dan instruksi ini juga berlaku bagi orang Banda dan Ternate.¹¹⁷

Ramainya pelayaran lokal yang menghubungkan Sula dan Ambon sangat dipengaruhi oleh komoditas perdagangan yang dihasilkan kepulauan Sula. Valentijn mencatat bahwa kepulauan

¹¹⁴ F. Valentyn, (1724), *op.cit.*

¹¹⁵ *Ibid.* hlm. 89.

¹¹⁶ *Ibid.*

¹¹⁷ *Ibid.*

Sula sangat subur dan memiliki komoditas yang berlimpah, menghasilkan banyak padi, beras dan kayu cendana.¹¹⁸ Merujuk pada penjelasan yang disampaikan oleh Valentijn, dapat di argumentasikan bahwa hubungan pelayaran dan perdagangan antar pulau pada era VOC yang menghubungkan kepulauan Sula, Banggai dan Ambon atau pulau-pulau lainnya di Maluku sangat dipengaruhi oleh komoditas yang dihasilkan oleh tiap pulau. Mobilitas pelayaran lokal yang tinggi telah menciptakan jaringan perdagangan lokal yang menghubungkan kepulauan Maluku dan Sulawesi. Dalam pelayaran dan perdagangan lokal yang menghubungkan Maluku dan Semenanjung Sulawesi telah menempatkan Sula sebagai transit pelayaran.

F. *Verwachting* : Benteng dan Pangkalan Perdagangan VOC di Kepulauan Sula.

Seperti halnya kesultanan Ternate, penguasa VOC yang memandang kepulauan Sula sebagai wilayah transit perdagangan dan lumbung pangan penting, berupaya untuk mengambilalih kontrol dari kesultanan Ternate. Dan untuk mewujudkannya, VOC tentu memanfaatkan ruang yang diberikan oleh penguasa Ternate terutama dalam pembangunan benteng di Sula. Sudah dapat dipastikan bahwa benteng merupakan sarana potensial bagi penguasa VOC untuk memperkuat posisi mereka atas kepulauan Sula. Dengan adanya benteng yang dikontrol oleh kongsi dagang VOC secara perlahan tapi pasti kekuasaan Ternate atas kepulauan Sula secara perlahan akan dikurangi.

¹¹⁸ *Ibid.*

Berdasarkan laporan abad ke 16, pangkalan VOC di kepulauan Sula yang dibangun atas dukungan Ternate, sejauh yang diketahui hanyalah benteng *Verwachting*. Benteng ini sesungguhnya dibangun pada mulanya oleh penguasa Ternate. Menurut Valenty¹¹⁹, benteng ini pada awalnya bernama benteng" t Claverblad, yang dibangun pada tahun 1623 oleh penguasa Ternate. Pada 1689 karena kondisinya yang sangat buruk sehingga diusulkan untuk membangun kembali benteng dan bahkan memindahkannya dari Ipa ke Satamata, lokasi benteng saat ini. Pada 1736 di bawah rezim Sultan Amir Iskandar Zulkarnain Saifuddin, benteng baru akhirnya dibangun dan kemudian diberi nama benteng *De Verwachting*. Pembangunan berlangsung di bawah pengawasan petugas VOC, Victor Moll. Dalam proses pengerjaannya dilakukan oleh orang-orang Ternate dibawah pengawasan Victor Moll, yakni arsitek yang ditugaskan khusus oleh penguasa VOC.

Menurut laporan Hulstijn, pembangunan benteng ini berawal ketika VOC mengirim sebuah kapal ke Sula dibawah komando Victor Moll. Dalam kunjungan ini, kapal VOC membawa banyak bahan bangunan, seperti: batu bata dari Jawa, peralatan besi dan peralatan perang seperti meriam dan peluru, dan di atas kapal terdapat pula 120 serdadu Jawa. Misi kunjungan ini dengan jelas, VOC ingin membangun sebuah benteng yang berfungsi sebagai kontrol kekuasaan dan pangkalan perdagangan. Victor Moll yang bertanggung jawab terhadap misi politik VOC, membiarkan para pemimpin Soela mendatangi kapal, dan

¹¹⁹ F. Valenty, *op.cit.*

menghendaki bantuan untuk mengunjungi daratan yang cocok, guna membangun sebuah benteng. Atas petunjuk beberapa penguasa Sula ia kemudian menuju Maleboeva di Soelabessi; untuk mencari tempat yang cocok untuk membangun benteng tetap tidak ditemukan karena dataran yang diamati adalah tanah berawa yang ternyata tak cocok. Ia kemudian menuju WaElaoe; dataran ini pun tidak memadai karena tidak terdapat pelabuhan yang cocok untuk persinggahan kapal.

Setelah WaElaoe, atas petunjuk pemimpin Sanana, Victor Moll akhirnya menemukan tempat yang kemudian dikenal sebagai Sanana yang dianggap sangat untuk membangun sebuah benteng. Setelah menemukan tempat yang cocok untuk membangun benteng, seluruh peralatan perang dan bahan bangunan dibongkar serta ditempatkan 120 serdadu Hindia yang dibawa di dalam kapal. Dalam proses pembangunan benteng, Victor Moll sekali lagi membangun kesepakatan dengan para pemimpin Sula. Adapun isi kesepakatan dimaksud adalah;

Negeri Mangole, WaEtena, GaE, Tjapaloeloe, Kabaoe dan Alifola harus membakar kapur dan mengangkut pasir, juga menebang kayu besi, sedangkan negeri-negeri lainnya seperti Fagoedoe, Flakoe, Tatje, Ipa, Bega dan Pohea harus menyerahkan batu-batu sungai.

Pembangunan Benteng menggunakan arsitektur Belanda klasik, dan memiliki bangunannya sendiri sebagaimana benteng Oranje di Ternate. Dinding yang mengelilingi pelabuhan dan benteng dibangun dari batu sungai, pada saat bersamaan dari bangunan ini dan benteng itu sendiri dibangun seperti: rumah

Komandan, tangsi dan gudang senjata yang dibuat dari batu bata merah Jawa, dan *alan* dari rumah Komandan serta sebuah tempat (lapangan berbentuk persegi di dalam benteng) yang lantainya ditutup dengan jenist batuan tersendiri, dimana yang tak dapat didatangkan dari sini tapi tentunya seharusnya didatangkan dari Jawa.¹²⁰

Pada tahun 1890 benteng itu digambarkan sebagai sangat bobrok oleh pengunjung Belanda. Pada saat itu, benteng itu digunakan sebagai tempat tinggal Salahakan, perwakilan dari Sultan Ternate. Pada dekade-dekade berikutnya, benteng itu pasti telah dipulihkan, karena setelah kunjungan pada tahun 1921, sejarawan Belanda Victor van de Wall menggambarkan bahwa benteng itu dalam keadaan baik. Sebagian dari senjata telah dikembalikan ke posisi semula, bangunan yang diplester di dalam tembok digunakan dan kuburan dari zaman VOC dipertahankan di luar tembok. Saat ini, bangunan-bangunan di dalam benteng telah dihancurkan. Sekarang ada lapangan olahraga di sini. Dinding setinggi empat meter dengan dua bastion di sudut yang berlawanan, sebuah gerbang sederhana dan menara tombak masih utuh.

¹²⁰ P. Van Hulstijn, (1918), *op.cit.* hlm. 45..

BAB V

KEPULAUAN SULA PADA ERA KEKUASAAN KOLONIAL

Perkembangan kekuasaan kolonial mengalami pasang surut dalam rentang sejarah politik dan kekuasaan di Indonesia. Dalam terminologi sistem kekuasaan, hal ini merupakan turbulensi dari sistem kebijakan penguasa kolonial yang selalu bervariasi dengan tujuan semata mempertahankan kekuasaan secara langgeng. Pergantian pemimpin dalam hirarki kekuasaan kolonial selalu melahirkan kebijakan-kebijakan yang sudah tentu akan membawa perubahan baru bagi daerah koloni. Sesuatu yang pasti dan tidak dapat di pungkiri adalah arah kebijakan baru penguasa kolonial atas penduduk daerah koloni selalu mengarah pada upaya memperbaiki kelemahan-kelemahan kekuasaan kolonial. Tetapi yang perlu dicermati dari kebijakan para penguasa kolonial di Indonesia adalah, variasi sistem kebijakan penguasa atau tepatnya kebijakan mempertahankan kekuasaan kolonial, dalam konteks perilaku penguasa, mereka (pemimpin-pemimpin kolonial) merupakan orang-orang yang hipokrit antara kebijakan dan tindakan kekuasaan.

Hal ini dalam konteks politik dapat diterima karena merupakan bagian dari strategi mempertahankan kekuasaan kolonial, namun situasinya amatlah berbeda jika dihubungkan dengan cara pandang penguasa bumiputera, dimana hal ini merupakan ambiguitas yang manyandera hak primordial dan secara faktual menghilangkan hak-hak primordial yang merupakan hak legalitas pribumi terhadap penduduk dan wilayah

kekuasaan yang di miliki yang telah terbangun sejak lama. Dalam hubungannya dengan sistem kekuasaan kolonial dan penguasa pribumi, kebijakan yang sangat mengemuka dalam sejarah Indonesia era kolonial adalah menjelang akhir abad ke XIX dan tepatnya dekade kedua akhir abad XIX. Pemerintah kolonial lewat Gubernur Jenderal Van Heutsz mencanangkan politik perluasan koloni atau *pacificatie politiek* (politik perdamaian).¹²¹ Rangkaian dari kebijakan politik ini adalah memaksa semua penguasa Bumiputra mengakui kekuasaan Pemerintah Hindia-Belanda dengan cara menandatangani plakat pendek atau *Korte Verklaring*. Kebijakan ini bukanlah tindakan personal yang dilakukan oleh penguasa kolonial yang dalam hal ini adalah Van Heutsz semata akan tetapi mendapat dukungan penuh dari penguasa tertinggi pemerintah Kerajaan Belanda yang disampaikan lewat pidato takhta (*Troop Rede*) Ratu Belanda pada 1901.

Korte Verklaring merupakan suatu bentuk kesepakatan politik antara daerah-daerah swapraja pribumi dan pemerintah Hindia Belanda yang mulai muncul pada akhir abad XIX. Daerah Hindia Belanda berada di bawah pemerintahan langsung atau merupakan daerah swapraja, yakni daerah tempat raja-raja dan rakyat pribumi memiliki hak memerintah sendiri. Bagi kondisi hukum politik, pembedaan menjadi daerah langsung dan swapraja

¹²¹ Arend Lijphart, *Verzuiling, Pacificatie en Kentering in de Nederlandse Politiek*, (Amsterdam: Amsterdam University Press), hlm. 99.

sangat penting bagi kekuasaan kolonial, mengingat hak penguasa swapraja diberikan kepada raja-raja dan rakyat pribumi.¹²²

Pencanangan Korte Verklaring oleh Van Heutsz secara juridis tidak hanya menjadi politik dan polemik baru dalam sistem kekuasaan di wilayah koloni akan tetapi kebijakan ini menjadi babak baru dalam sejarah kekuasaan kolonial di Indonesia karena secara juridis hukum kolonial mulai diterapkan di seluruh Indonesia. Trend baru yang muncul dalam pemberlakuan hukum kolonial yakni ditempatkannya *Gezagheber* yang merupakan penguasa militer di wilayah distrik disertai dengan kontrol atas hak penguasa pribumi yang mencakup aspek pengelolaan wilayah dan juga penduduk. Selain itu berlakunya *Korte Verklaring* menjadi pondasi hukum bagi peniadaan berbagai kebijakan politik dan hukum yang pernah dihasilkan sebelumnya antara penguasa pribumi dan penguasa kolonial.

Pemberlakuan *Koorte Verklaring* telah membawa perubahan pula pada kepulauan Maluku. Kepulauan Sula yang menjadi vasal Ternate ikut mengalami perubahan. Pemerintahan membuat kebijakan baru dalam menata system piolitik dan kekuasaan serta memberi perubahan dalam hubungan pelayaran dan perdagangan.

¹²² J. De Vries, *Winkler Prins Algemeene Encyclopaedie*, (Amsterdam: Uitgeverij Maatschappij, Elsevier, 1936), hlm. 693.

G. Hubungan Dengan Pemerintah Kolonial Belanda.

1. Fase Awal Hubungan dengan Pemerintah Kolonial

Sejak ditandatanganinya plakat pendek atau *Koorte Verklaring*, oleh penguasa pribumi sejak itu pula terjadi pemangkasan hak-hak primordial yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda. Kepulauan Sula yang berada dibawah karesidenan Ternate berada langsung dibawah pemerintah kolonial Belanda. Pembentukan daerah-daerah swapraja menjadi fenomena umum dalam kebijakan kolonial. Dalam hungannya kekuasaan, wilayah Kepulauan Sula di atur oleh pemerintah kolonial dengan Kesultanan Ternate dan kesepakatannya dituangkan dalam kontrak 28 Juni 1909 (Gouvernement Besluit tertanggal 22 Februari 1910 No. 4).¹²³ Peraturan ini kemudian diikuti dengan penandatangan *Koorte Verklaring* oleh Sultan Ternate (Gouvernement Besluit 6 Desember 1910 No. 14) pada tanggal 22 Juni 1910 dan 13 Nopember 1915 yang saat ini masih mengupayakan kekuatan kontrak pendek, yang disetujui dan diperkuat oleh Gouvenement Besluit 10 Mei 1916 No. 7.¹²⁴

Kontrak yang dibuat Antara pemerintah kolonial Belanda dengan Kesultanan Ternate, pada umumnya berisi hak-hak dari kedua belah pihak, kewajiban dan wewenang, dan juga uraian terperinci setiap daerah swapraja, yang sesuai dengan keputusan

¹²³ P. Van Hulstijn, *Memorie over de Soela-Eilanden* dalam *Encyclopadisch Bureau, Aflevering XV*, (Weltevreden: N.V. Boekhandel Visser & Co. – 1918), hlm. 124.

¹²⁴ Untuk pemeritahuan yang lengkap dari kontrak-kontrak yang dibuat oleh pemerintah kolonial Belanda dengan kesultanan dll. Pemberitahuan yang ada di muat dalam catatan penjelasan pada kontrak tahun 1909.

16 Desember 1910 No. 14 oleh Residen Ternate sebagai petunjuk untuk ditempatkan pada penggunaan wewenang kekuasaan yang diberikan berdasarkan ketentuan termuat dalam *Koorte Verklaaring*. Secara teknis, seluruh ketentuan dituangkan dalam penjelasan dari peraturan Pemerintah Swapraja (Staatsblat 1914 No. 4 yang berlaku untuk Ternate).

Dalam hubungan yang spesifik dengan kepulauan Sula, terutama yang berkaitan erat dengan struktur kekuasaan menurut mekanisme kekuasaan kolonial, pengaruh Pemerintah Swapraja pada fase-fase awal sangat kecil. Pengaruh dari pemerintah swapraja di kepulauan Sula sangatlah terbatas.¹²⁵ Kondisi ini dimungkinkan oleh adanya sistem lama yang masih kuat di kepulauan Sula.

H. Sistem Pemerintahan Menurut Mekanisme Kolonial.

1. Kondisi Awal Penataan Kekuasaan

Sesuai dengan kontrak yang ada, pemerintahan dijalankan oleh sultan di tahun-tahun sebelumnya, seperti juga pembesar daerah yang diangkat di Kepulauan Sula. Perubahan kekuasaan di Sula secara signifikan mulai dilakukan oleh pemerintah kolonial pasca terjadinya pemberontakan Baba Dano Hasan. Untuk tidak terjadi lagi peristiwa yang sama, pemerintah kolonial menempatkan beberapa *posthouder* (pejabat sementara) di wilayah yang diperintah kesultanan untuk wilayah Halmahera pada tahun 1880, dimana memiliki tugas untuk melindungi penduduk

¹²⁵ *Ibid.*

peribumi dari sisi pemimpin Ternate. Afdeeling Kepulauan Sula pada waktu itu juga menerima kehadiran *posthouder* Eropa pertama.¹²⁶

Menurut ketentuan kolonial, wilayah kerja dsan tugas utama dari seorang *posthouder* tidak hanya melakukan pengawasan secara langsung atas daerah-daerah daerah taklukan; tetapi juga melaksanakan misi politik berupa pengalihan pola kekuasaan kesultanan Ternate ke Tangan pemerintah kolonial. Dengan jelas bahwa pemerintah kolonial pada konteks ini berupaya untuk melemahkan sistem kekuasaan kesultanan yang berlaku di Sula. Salahakan dengan demikian akan berkurang otoritas kekuasaannya dan beralih ke *posthouder*.

Kecilnya pengaruh *posthouder* di Sanana pada tahun 1881 (fase awal kekuasaan) disebabkan karena masih kuatnya pengaruh Kesultanan Ternate. Di Taliabu, bahkan pada tahun 1802 seorang *posthouder* masih tidak diakui. Rasa ketidakpuasan ini kemudian ditunjukkan oleh penduduk Muslim Taliabu dan juga orang *Alfur* dengan melakukan pemberontakan, sebagai bentuk penolakan mereka atas kehadiran seorang *posthouder*. Akibat adanya penolakan dari penduduk kepulauan Sula terhadap kebijakan pemerintah kolonia, pada tahun 1906, pemerintahan kepulauan Sula untuk sementara ditempatkan dibawah *posthouder* di Bacan.¹²⁷ Pada kondisi pengaruh kekuasaan yang terbatas, biasanya seorang *posthouder* dalam menjalankan kekuasaan akan bermusyawarah

¹²⁶ B.J. Haga, *Memorie van Overgave van Bestuur van den Aftredenden Resident der Molukken*, (ANRI), hlm. 7

¹²⁷ P. Van Hulstijn, (1918), *op.cit.* hlm. 124.

dengan *Salahakan* dan para *Sangaji* atau sebaliknya *Salahakan* dan *Sangaji* akan meminta pertimbangan pada *posthouder*.

2. Kondisi Pemerintahan Kolonial Sejak 1909

Sejak perubahan kebijakan politik di Sula secara perlahan, sistem pemerintahan kesultanan mulai melemah. Gerakan sosial yang dilakukan oleh penduduk kepulauan Sula untuk tetap melegitimasi sistem pemerintahan kesultanan yang kemudian berhasil dipatahkan, telah membawa pengaruh yang kuat terhadap jabatan *posthouder* dan hal ini tentu telah melemahkan secara struktur pengaruh kekuasaan kesultanan Ternate. Dapat disebutkan pada tahun 1909, dimana Sultan membuat kesepakatan dengan mengadakan kontrak, yaitu konversi daerah yang dibebani pajak. Di Taliabu, konversi ini mengalami kesulitan karena tidak mendapat respon positif dari para kepala desa. Oleh karena itu penguasa Ternate di Taliabu yang menduduki jabatan tinggi oleh Residen dipindahkan ke Ternate dan Sangaji dipindahkan ke Sanana. Setelah tagihan pajak dapat dilakukan tanpa kesulitan, sangaji diperkenankan pulang kembali ke Taliabu.¹²⁸

Pada tahun 1910 Sultan Ternate dipaksa untuk menandatangani *Korte Verklaring* yang menyebutkan tentang sistem pemerintahan baru menurut pandangan orang-orang Belanda. Sistem ini kemudian dikenal sebagai sistem kolonial dan hendak diterapkan diseluruh wilayah Hindia Belanda. Karena merupakan bentuk pemerintahan baru, Sultan Ternate diharuskan

¹²⁸ *Ibid.* hlm. 109

memahaminya dan tentu harus dibawah bimbingan pejabat Eropa.

Setelah tahun 1910 pemerintahan di Kepulauan Sula masih menggunakan pola lama, dimana para sangaji harus tinggal di daerah kerjanya. Residen biasanya membawa para Sangaji ke daerah-daerah tugas mereka dengan menggunakan kapal laut. Pada akhir tahun 1911 di Sanana, pemerintah kolonial kembali menempatkan seorang *postboulder*, namun kali ini dengan perintah yang jauh lebih jelas daripada sebelumnya dan ini berlangsung hingga tahun 1912. Selain mengatur pejabat pribumi, residen juga satu detasemen polisi bersenjata untuk membantu *postboulder* untuk waktu terbatas. Hal ini berlangsung selama bertahun-tahun dan terjadi beberapa kali sebagai contoh untuk mencari narapidana atau orang yang tidak melakukan pembayaran pajak di Taliabu.¹²⁹

Pada bulan Februari 1912, pemerintah kolonial mengadakan rapat di Ternate untuk membahas mekanisme pemerintahan yang lebih rendah dan juga termasuk pemerintahan yang berjalan di kepulauan Sula. Kputusan dalam rapat tersebut mencakup sebagai berikut:

“Pegawai Sultan yang dalam jumlah banyak sekali dan lebih daripada yang dibutuhkan, yang akan menduduki jabatan tinggi pemimpin dan lainnya, menjadi parasit bagi penduduk dari jabatan mereka dan suatu kelebihan daripada yang diperlukan dari kebutuhan dan mata rantai rintangan. Termasuk atasnya kepala distrik yang diangkat. Pada

¹²⁹ *Ibid.*

hubungan langsung dengan penduduk mereka mengatur atas sejumlah pemimpin kampung yang terbatas. Se jauh mungkin untuk itu kampung-kampung akan digabungkan; tetapi para pemimpin kampung masih dibantu oleh *mahimo* – pemimpin sub kampung – dalam pelaksanaan tugas mereka di dalam kampung. Pemimpin distrik dan lainnya seharusnya dipilih dari penduduk pribumi. Sebab-sebab kepentingan pekerjaan dapat disisihkan. Juga pemimpin distrik dapat dipindahkan menuju distrik lainnya, pada yang terbukti tidak mampu memecahkan permasalahan dan pada pada kondisi jika ketiadaan tenaga yang cocok dari penduduk lokal, diganti oleh penduduk pribumi yang berasal dari tempat lain. Kepala distrik menerima upah f. 50,- setiap bulan dan ganti rugi untuk biaya perjalanan dan tempat tinggal pada perjalanan dinas keluar distrik mereka. Seorang juru tulis ditambahkan atas sebuah traktat dengan upah f. 15,- per bulan. Kepala kampung menerima upah 8% dari pengumpulan pajak; pada mereka diperbantukan seorang *mahimo*, dimana mereka berbagai pengumpulan dengannya. Pada perjalanan dinas ke luar distrik mereka menerima ganti rugi.”¹³⁰

Regulasi ini secara hukum mulai diberlakukan pada tanggal 1 Juli 1912. Kebijakan pemerintah kolonial dengan jelas sangat sarat dengan kepentingan politik. Sepertinya mereka sangat tidak menghendaki adanya kebangkitan kembali kekuasaan pribumi.

Pada awalnya jabatan kepala distrik untuk seluruh *afdeeling* diserahkan pada *salabakan* yang lama; sangaji, dengan pengecualian dua orang sangaji, dan jumlah bobato tidak dikurangi. Akan tetapi dalam bentuk apapun juga kebijakan kolonial terhadap Sula, ketidak puasan selalu muncul dikalangan

¹³⁰ *Ibid.* hlm. 110.

penguasa pribumi, dimana kebanyakan para pemimpin lokal dalam menjalankan kekuasaan tetap mempertahankan pola-pola lama. Atas hal ini, pemerintah kolonial kemudian memberangus para pemimpin pribumi. Para sangaji yang dianggap telah berusia lanjut lambat laun diberhentikan. Pemimpin distrik (*salahakan*) juga diberhentikan secara sepihak atau atas permohonan. Demikian halnya dengan Sangaji yang diganti oleh *posthouder*, dengan dasar adanya kesepakatan yang telah diputuskan bersama dengan para *bobato*.

Pada tanggal 1 Mei 1914, pemerintah kolonial menerbitkan Staatsblad No. 209 tahun 1914 yang berisi ketentuan mengenai reorganisasi pemerintahan dan sarana pemerintahan untuk daerah Ternate dan Daerah Taklukannya. Sebagai akibat reorganisasi ini Kepulauan Sula digabungkan sebagai *onderafdeeling* dengan *afdeeling* bacan dan ditempatkan seorang *Gezaghebber* sebagai kepala pemerintahan. Dengan adanya pengangkatan seorang *Gezaghebber*, menjadi kepala pemerintahan maka *posthouder* untuk sementara tidak difungsikan.

C. Penarikan Pajak, Praktik Kerja Wajib dan Peradilan.

1. Penarikan Pajak

Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa penarikan pajak telah berlaku pada masa kekuasaan Kesultanan Ternate. Akan tetapi dengan adanya peralihan kekuasaan, situasinya telah mengalami perubahan. Penarikan pajak di kepulauan Sula untuk kebutuhan Sultan berakhir melalui kontrak yang dibuat oleh pemerintah kolonial pada tahun 1880.

Pola lama dalam penarikan untuk kepulauan Sula yang ini juga kemudian dimanfaatkan oleh pemerintah kolonial, mekanismenya telah dicantumkan dalam *atoran* beban pajak bagi penduduk yang terbagi dalam berbagai kelompok penduduk. Pajak-pajak – *upeti* – dilunasi dalam bentuk hasil bumi, dimana pajak dibayar oleh keluarga; wanita, yang bertindak sebagai kepala rumah tangga, juga membayar pajak. Untuk darah orang Sula *upeti* terdiri dari *kora-kora*, beras, minyak, dan lilin' pada penduduk Taliabu terutama harus menyediakan sagu-gambir. Kerja wajib – *batuang* – dijalankan oleh mereka yang belum menikah.¹³¹

Para pemimpin Ternate telah menerima bagian yang merupakan haknya. Pekerjaan-pekerjaan secara personal di benteng sanana dibayar sejumlah *f.* 1,60,- per bulan dan per orang, dimana *salahakan* atas hal ini menerima rata-rata *f.* 50,- setiap bulannya. Para pemimpin masyarakat membuat diri mereka tuan dari sisa hasil panen tanah. Di tahun-tahun menguntungkan mereka menjual hasil panen pada harga minimum atau menyimpannya atas pengertian di masa lalu mengenai benih padi yang dipinjamkan. Kerja wajib dalam jumlah kecil, dimana mereka mungkin membuat tuntutan hak, ditunjukkan oleh mereka sekali lagi hingga mencapai lebih dari 100 orang.¹³² Terhitung sejak tahun 1909, telah dilakukan konversi pajak berdasar kebutuhan kesultanan sebagai hak mereka. Dalam kesesuaiaannya pada tahun itu juga dilakukan penaksiran pajak, kebanyakan pajak langsung

¹³¹ F.S.A. de Clercq, *Bijdragen tot de Kennis der Residentie Ternate*, (Leiden: E.J. Brill, 1800), hlm. 116.

¹³² P. Van Hulstijn, (1918), *op.cit.* hlm. 113.

dibayar oleh penduduk. Sesuai dengan aturan baru dibayarkan pajak per tahun oleh tiap-tiap orang yang telah menikah atau seluruh pria yang telah beristri f. 4,-, dan oleh pria yang belum menikah selama 2 tahun pertama f. 2,-, yang setelahnya juga dibayarkan f. 4,-. Oleh kepala pemerintahan daerah orang Mange dan Seboyo dibebaskan pada tahun-tahun pertama. Ketika selanjutnya interaksi dengan orang-orang ini berjalan mereka dapat membayar sama seperti penduduk lainnya.¹³³ Bagi penduduk yang tidak di bawah kekuasaan pemerintah swapraja, berlaku pajak yang umum. Orang Eropa dan dengan mereka yang disamakan statusnya membayar pajak pemasukan dan perseorangan, Timur Asing pajak individu, pajak usaha dan pajak pemasukan, demikian pula dengan penduduk pribumi daerah taklukan pemerintah membayar pajak pemasukan dan pajak usaha sebagaimana pajak pertahanan.

2. Praktik Kerja Wajib.

Pada tahun 1912, pemerintah kolonial mulai menjalankan kembali kebijakan kerja wajib. Menurut ketentuan-ketentuan kolonial, kerja wajib yang dibebankan bagi penduduk Sula jumlah maksimumnya adalah 42 hari per tahun. Akan harapan dari pemerintah kolonial terhadap kerja wajib tidak berjalan maksimal atau tidak mencapai target yang diharapkan. Kerja wajib terutama dijalankan oleh Orang Sula pada pekerjaan jalan.

¹³³ *Ibid.*

Sedikit untuk memastikan mengenai target yang gagal dari pemerintah kolonial dalam praktik kerja wajib yang mereka jalankan. Tetapi factor yang sangat kompleks seperti keengganan penduduk dan juga ketidakpuasan dari penguasa pribumi menjadi faktor pendukung adanya kegagalan dalam mencapai target praktik kerja wajib.

3. Praktik Peradilan

Pada masa pemerintahan sultan, peradilan bersandar pada suatu peran dewan pemimpin-pemimpin rakyat, yang dikuasai oleh *salahakan* dan selebihnya pada sultan. Dewan tersebut, yang berkumpul sekali seminggu, umumnya menjatuhkan hukuman pada para pelanggar hukum dengan denda uang atau kurungan tertinggi tiga bulan, dimana urusan sipil diselesaikan dengan pembayaran kembali dari yang dituntut dan dengan tinggal di kurungan 8 0 15 hari. Jauh di masa lalu perselingkuhan dihukum dengan 100 cambuk rotan, sedangkan di masa-masa akhir ini paling tinggi dikurung selama 3 bulan. Seluruh pelanggaran hukum dibawa pada sultan, yang padanya dialirkan darah. Umumnya urusan yang secikit muncul pada dewan pemimpin, dimana kejahatan terjadi dalam jumlah kecil, yang diadil langsung oleh Sultan.¹³⁴

Pada saat pemerintah kolonial mengendalikan kekuasaan, seluruh peradilan diserahkan pada: Magistrat, Landraad, Pengadilan karesidenan, Dewan Kerajaan, dan Pengadilan pribumi. Kekuasaan hukum dari tiga lembaga yang disebut

¹³⁴ *Ibid.* hlm. 115.

pertama menjangkau orang Eropa dan mereka yang diperlakukan sama dan atas penduduk pribumi, yang merupakan warga pemerintah; dewan kerajaan dan pengadilan pribumi atas daerah taklukan pemerintah swapraja.

I. Kebijakan Kolonial di Bidang Pelayaran

Pada tahun 1865, pemerintah kolonial Belanda mulai merestrukturisasi kembali sistem pelayaran di Hindia Belanda. Perluasan jaringan pelayaran menjadi bagian dari paket kebijakan ini. Perluasan jaringan pelayaran, dilakukan untuk memperlancar hubungan antar pulau yang pada waktu sebelumnya tidak maksimal terutama dikawasan timur besar. Ditengah perluasan jaringan pelayaran, pembangunan sarana pelabuhan menjadi bagian vital yang dilakukan untuk mendukung terciptanya sistem pelayaran ideal di Hindia Belanda. Hal ini tanpa kecuali dengan maskapai pelayaran yang memainkan andil bagi terciptanya hubungan antar pulau melalui arung samudera. Koninklijke Paketvaart Maatschappij (KPM)¹³⁵ yang merupakan maskapai pelayaran milik pemerintah kolonial segera dibentuk untuk mendukung terciptanya sistem pelayaran dimaksud. Selain KPM, maskapai pelayaran swasta yang bergerak dibidang eksport-import ikut melibatkan diri dalam mendukung terciptanya pelayaran di Hindia Belanda diantaranya maskapai pelayaran Java-China Paketvaart Linen. Modernisasi sistem pelayaran yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda telah membawa

¹³⁵ Rasyid Asba, *Kopra Makassar Perebutan Pusat dan Daerah: Kajian Sejarah Ekonomi Politik Regional di Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), hlm. 86.

dampak yang luas terhadap jaringan pelayaran di kepulauan Maluku. Sula dalam hal ini juga masuk dalam jaringan pelayaran kapal-kapal KPM. Untuk mengatur arus pelayaran khususnya di karesidenan Ternate yang juga membawahi kepulauan Sula, tanggung jawab penuh diberikan kepada Residen Ternate. Kapal-kapal yang ditetapkan untuk melayani rute pelayaran yang menghubungkan wilayah-wilayah yang berada dibawah karesidenan Ternate masing-masing adalah kapal milik pemerintah kolonial *S. S. "Zwaluw"* (berat kapal 802 ton), kapal polisi dan komunikasi "*Nora*" (berat kapal 122 ton), sedangkan tipe kapal lainnya yang juga diminta untuk melayani pelayaran.¹³⁶

Kapal *S. S. Zwaluw* dapat mengangkut $\pm$ 100 orang, sedangkan kapal *P en C* pada perjalanan yang lebih singkat dapat mengangkut $\pm$ 40 orang. Kapal yang disebutkan terakhir berkecepatan sekitar 8 mil dalam kondisi yang kurang menguntungkan. Bahan bakar, yang umumnya digunakan adalah kayu. Residen Ternate juga memiliki kewenangan atas dua kapal tambahan dari K.P.M., yang terletak di dalam wilayah, dengan syarat bahwa gangguan atas keterlambatan tidak lebih lama daripada 6 jam dan kapal tidak dapat melanggar ketentuan yang telah ditetapkan.¹³⁷

¹³⁶ P. Van Hulstijn, (1918), *op.cit.* hlm. 103.

¹³⁷ *Ibid.*

BAB VI

P E N U T U P : AKHIR PENELUSURAN

Kepulauan Sula yang menjadi wilayah Vasal Kesultanan Ternate yang berada di wilayah semenanjung timur Celebes (Sulawesi). Wilayah ini dalam perspektif kesejarahan, berada dibawah kekuasaan Ternate setelah ditaklukan oleh keluarga Tomaitu. Selama berada di bawah kekuasaan Ternate, eksploitasi wilayah dan penduduk menjadi fenomena historis yang mengemuka. Kondisi inilah yang kemudian menimbulkan adanya situasi geopolitik yang tidak menentu. Kepulauan Sula sering menjadi tempat pelarian politik bangsawan Ternate, terutama pada abad ke 16. Selama masa kekuasaan Kesultanan Ternate, penduduk Sula menjadi kawula yang diharuskan melaksanakan kerja wajib.

Kehadiran orang-orang Belanda di Kepulauan Maluku telah membawa perubahan signifikan dalam bidang politik dan ekonomi. Wilayah Sula sebagai Vasal Ternate juga tidak luput. Belanda yang kemudian membentuk kongsi dagang VOC pada 1602 memaksa Sultan Ternate untuk menyerahkan kontrol wilayah Sula, Seram, Buru dan Ambon. Walaupun Sultan dan para bangsawannya merasa keberatan terhadap keinginan VOC tetapi perjanjian tahun 1601¹³⁸ membuka peluang dimaksud karena Ternate sesungguhnya mengharapkan dukungan Belanda dalam perang melawan Portugis dan Spanyol. Setelah berkuasa, kepulauan Sula menjadi wilayah yang juga ikut dikontrol oleh

¹³⁸ M. Dassen H.J.Zoon, *De Nederlanders in de Molukken*, (Utrecht: W.H.Van Heijningen, 1848), hlm. 35.

VOC. Walaupun pejabat-pejabat VOC tetap membiarkan pemerintahan Sula berjalan menurut sistem kesultanan tetapi eksploitasi wilayah dan penduduk kembali intensif dilakukan. Oleh VOC, Penduduk Sula juga masuk dalam agenda penyerahan wajib.

Selama berkuasanya VOC, telah terjadi kontak pelayaran dan perdagangan antara Ambon, Sula, Banggai, dan Ternate. Laporan dari era VOC membuktikan bahwa VOC selama berkuasa telah membuat kebijakan untuk mengatur jalan pelayaran lokal yang berlangsung secara intensif. Tetapi terkadang pejabat-pejabat VOC bersikap ambiguitas dalam membuat kebijakan terhadap pelayar lokal dari Ambon ke Sula dan Banggai.

Pencanangan Korte Verklaring oleh Van Heutsz secara juridis tidak hanya menjadi politik dan polemik baru dalam sistem kekuasaan di wilayah koloni akan tetapi kebijakan ini menjadi babak baru dalam sejarah kekuasaan kolonial di Indonesia karena secara juridis hukum kolonial mulai diterapkan di seluruh Indonesia. Trend baru yang muncul dalam pemberlakuan hukum kolonial yakni ditempatkannya Gezagheber yang merupakan penguasa militer di wilayah distrik disertai dengan kontrol atas hak penguasa pribumi yang mencakup aspek pengelolaan wilayah dan juga penduduk. Berlakunya *Koorte Verklaring* telah membawa perubahan pula pada kepulauan Maluku. Kepulauan Sula yang menjadi vasal Ternate ikut mengalami perubahan. Pemerintah kolonial telah membuat kebijakan baru dalam menata sistem piolitik dan kekuasaan serta memberi perubahan dalam hubungan pelayaran dan perdagangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andaya, Leonard Y., 1993. *The World of Maluku : Eastern Indonesia in the Early Modern Period*, Honolulu USA: University of Hawaii Press.
- _____, 1991. *Local Trade Networks in Maluku in The 16th, 17th, and 18th Centuries*, *Cakalele*, vol. 2, nomor 2.
- Lijphart, Arend, 2008. *Verzuiling, Pacificatie en Kentering in de Nederlandse Politiek*, Amsterdam: Amsterdam University Press.
- Boxer, C.R., 1977. *The Dutch Seaborne Empire 1600-1800*, London: A Pelican Book.
- _____, 1983. *Jan Kompeni Sejarah VOC dalam Perang dan Damai 1602-1799*, Terjemahan; Bakri Siregar, Jakarta: Sinar Harapan.
- Chaudhuri, K. N., 1985. *Trade and civilisation in the Indian Ocean: an economic history from the Rise of Islam 1750*, London: Cambridge University Press.
- Clercq, F.S.A. De, 1800. *Bijdragen tot de Kennis der Residentie Ternate*, Leiden: E.J. Brill.
- Crab, P. van der, 1862. *De Moluksche Eilanden : Reis van ZE. Gouverneur Generaal Charles Ferdinand Pabud*, Batavia; Lange en Co.
- Crib Robert and Kahin Audrey, 2004. *Historical Dictionary of Indonesia*, Toronto: Scarecrow Press, 2004.
- Dassen M. H.J.Zoon, 1848. *De Nederlanders in de Molukken*, Utrecht: W.H.Van Heijningen.
- Fortgens. J. 1915. *Zendingsarbeid op Taliaboe Mededelingen dalam Ned. Zendel. Genootschap*.

- Fraassen, Ch. F. Van*, 1987. Ternate, De Molukken en de Indonesische Archipel; Van Soa-Organisatie en Vierdeling een Studie van Traditionale Samenleving en Cultuur in Indonesië Deel I, II, Leiden: Proefschrift, Rijksuniversiteit.
- Ganshof, F. L. 1939. *Benefice and Vassalage in the Age of Charlemagne*, Cambridge: *Historical Journal*.
- Garraghan, Gilbert Joseph, 1974. *A guide to historical method*, Michigan: Greenwood Press, 1974.
- Gottschalk, Louis, 1975. *Mengerti Sejarah, Terjemahan Nugroho Notosusanto*, Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.
- Graaf, H.J. de, 1977. *De geschiedenis van Ambon en de Zuid-Molukken*, Uitgeverij T. Wever B.V.- Franeker.
- _____, 1971. *Historiografi Hindia Belanda*, Terjemahan; C.P.F. Luhulima, Jakarta: Bhratara.
- Haga, B.J. *Memorie van Overgave van Bestuur van den Aftredenden Resident der Molukken*, (ANRI).
- Hart, C. Van der, 1853. *Reize Rondom het Eiland Celebes en naar Eenige der Moluksche Eilanden*, 's Gravenhage: K. Fuhri, 1853.
- Hoevell, W.R. Van, 1856. *De Moluksche Eilanden*, Zalt-bommel: Joh. Noman en Zoon.
- Hulstijn, P. Van, 1918. *Encyclopaedisch Bureau, Aflevering XV, Soela-Eilanden*, Weltevreden: N.V. Boekhandel Visser & co.

- _____, 1919. *Het Soela Eilanden*, dalam *Tijdschrift van Economische Geographie*.
- Juniawan Priyono dan Purnomo Yusgiantoro, 2017. *Geopolitik, Geostrategi, Geoekonomi*, Bogor: Unhan Press.
- Keuning, J. 1944. *De tweede schipvaart der Nederlanders naar Oost-Indië onder Jacob Cornelisz. van Neck en Wybrant Warwijck, 1598-1600*, s'Gravenhage: Martinus Nijhoff.
- Knaap, G.J., *Kruidnagelen en Christenen de Verenigde Oost Indische Compagnie en de Bevolking van Ambon 1656-1696*, Leiden: KITLV, 1987.
- _____, 1987. *Memories van Overgave van Gouverneurs van Ambon in de Zeventiende en Achttiende Eeuw*, s-Gravenhage: Martinus Nijhoff.
- _____, 1993. *The Saniri Tiga Air (Seram); An account of its discovery and interpretation between about 1675 and 1950*, Leiden: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde.
- Lach, Donald F. and Kley, Edwin J. Van, 1998. *Asia In The Making of Europe Volume III; A Century of Advance, Book I*, Chicago: University of Chicago Press.
- Leur, Van J.C., 1960. *Indonesia Trade and Society*, Bandung: N.V. Mij Vorkink Van Hoeve.
- _____, 2015. *Perdagangan dan Masyarakat Indonesia, Esai-esai Tentang Sejarah Sosial dan Ekonomi Asia*, (terj. Abmi Handayani dkk.), Yogyakarta: Komunitas Bambu.
- Parthesius Robert, 2010. *Dutch Ships in Tropical Waters: The Development of the Dutch East India Company (VOC) Shipping Network in Asia 1595-1660*, Amsterdam: Amsterdam University Press.
- Rasyid Asba, 2007. *Kopra Makassar Perebutan Pusat dan Daerah: Kajian Sejarah Ekonomi Politik Regional di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

- Reid, Anthony, 2011. *Asia Tenggara Dalam Kurun Niaga 1450-1680 Jilid 2: Jaringan Perdagangan Global*, (terj. R.Z. Leirissa dan P. Soemitro), Jakarta; Komunitas Bambu.
- Rumphius, G.E., 1910. *De Ambonsche Historie*, S-Gravenhage, Martinus Nijhoff.
- _____, 1980. *Ambonsche Landbeschrijving*, Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia.
- R.Z. Leirissa, (Ed.), 2008. *Sejarah Nasional VI*, Jakarta: Balai Pustaka.
- _____, 2008. *Sejarah Nasional Indonesia Jilid III*. (Edisi Pemutakhiran), Jakarta: Balai Pustaka.
- Tiele, P.A. 1876. *De Europeers in den Maleischen Archipel, Eerste Gedeelte*, 1509-1529, BKI, vol. XXIV.
- _____, 1881. *De Europeers in den Maleischen Archipel* Bagian V : 1578 – 1599, BKI, volume 29.
- _____, 1890. P.A. Tiele, *Bouwstoffen voor de Geschiedenis der Nederlanders in den Maleischen Archipel*, 's Gravenhage: Martinus Nijhoff.
- Valentijn, F. 1724. *Uitvoerige beschryving der vyf Moluccos*, Dordrecht: Joannes van Braam Boekverkoopen.
- Vlekke, H.M. 2008. *Nusantara: Sejarah Indonesia*, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2008.
- Vries, J. De. 1936. *Winkler Prins Algemeene Encyclopaedie*, Amsterdam: Uitgeverij Maatschappij, Elsevier.

KEPULAUAN SULA

DALAM PERSPEKTIF SEJARAH

Kepulauan Sula dalam Perspektif Sejarah, demikian judul utama dari buku ini, secara spesifik terlihat mudah tetapi sesungguhnya kajiannya sangat kompleks karena merekonstruksi sejarah kepulauan Sula secara utuh dengan periodisasi yang lama membutuhkan ketelitian tersendiri sebab konteks peristiwa antar periode sangatlah berbeda. Hambatan yang juga mengemuka adalah adanya keterbatasan sumber-sumber primer mengenai kepulauan Sula. Rata-rata sumber yang membahas kepulauan berasal dari abad ke 18 dan 19. Laporan spesifik mengenai Sula pada sebelum abad ke 16 masih sangat sulit untuk ditemukan. Harapannya tentu pada laporan-laporan yang berasal dari era VOC (1602-1799), tetapi perlu dipahami bahwa konsentrasi VOC dalam pelaporan sebagian besar menyangkut pusat-pusat kekuasaan utama seperti Ternate, Tidore, Makian, Ambon, Huamual, dan Banda. Laporan mengenai Sula disampaikan secara acak dalam pemberitaan mengenai wilayah kekuasaan Ternate.

Sekalipun sangatlah kompleks, tetapi optimisme yang tinggi dalam penulisan buku ini sehingga problem sejarah Kepulauan Sula mampu terpecahkan. Menganalisa data terbatas terutama pada periode awal sejarah Sula sehingga rekonstruksi mampu diselesaikan. Kami memahami bahwa tidak ada kebenaran sejati yang dikemukakan pada penulisan buku ini tetapi masih ada fakta-fakta sejarah yang tidak terjangkau karena keterbatasan sumber. Mengenai kepulauan Sula tentang sejarah, belum banyak dilakukan atau lolos dari perhatian sekalipun penuh konsekuensi. Untuk mencapai hasil maksimal dalam pembahasan, kami melakukan pendekatan tematik dalam proses penulisan. Hal ini kami lakukan untuk menghindari persoalan sejarah yang bersifat menjebak. Selain itu penulisan sejarah dengan pendekatan tematik pada sejarah kepulauan Sula sedikit lebih mudah jika dibandingkan dengan menyusun narasi sejarah dengan pendekatan kronologis. Dan ini terbukti memberi hasil positif karena penulisan buku ini mampu kami selesaikan dan walaupun hasilnya tidak sempurna.

Buku ini setidaknya menjadi referensi mengenai Kepulauan Sula dalam memahami pendekatan historiografinya. Buku Kepulauan Sula Dalam Perspektif Sejarah yang ada di tangan para pembaca yang budiman semoga memberi asas manfaat terutama pada level sejarah lokal yang ada di Maluku utara.



Penerbit :
Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Maluku (BPNB)
Jl. Ir. M Putuhena Wailela Poka Rumah Tiga Ambon
Tlp/Fax : (0911) 322717
✉ [bpnbmaluku.Maniz@gmail.com](mailto:bpnbm Maluku.Maniz@gmail.com)  BPNB Maluku
 www.Kemendikbud/bpnbm Maluku.go.id

ISBN 978-623-92863-7-8

